

PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SAHENDARUMANG UNTUK KONSERVASI JENIS TERANCAM PUNAH DAN JASA-JASA LINGKUNGAN YANG VITAL



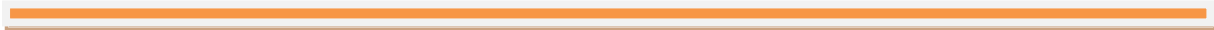
**PELAKSANAAN PROGRAM
PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SAHENDARUMANG
UNTUK KONSERVASI JENIS TERANCAM PUNAH DAN
JASA-JASA LINGKUNGAN YANG VITAL**

LAPORAN AKHIR

Oleh:

Perkumpulan Sampiri Kepulauan Sangihe

Kerjasama:



**PELAKSANA PROGRAM
PELESTARIAN HUTAN LINDUNG SAHENDARUMANG
UNTUK KONSERVASI JENIS TERANCAM PUNAH DAN
JASA-JASA LINGKUNGAN YANG VITAL**

PERKUMPULAN SAMPIRI KEPULAUAN SANGIHE

Tim Kerja:

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Denisius N. Piara | Koordinator |
| 2. Joandi C. Arendege | Staf Pendukung |
| 3. Yan Lumasuge | Staf Pendukung |
| 4. Maria L. Karimela | Staf Administrasi dan
Keuangan |

SURAT PENGANTAR

Nomor: 01.10.psk.2.2017

Kepada Yth.:
Bapak Adi Widyanto
Burung Indonesia
Jl. Dadali No. 32 Tanah Sareal
Bogor 16161 – Jawa Barat

di
Tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan dokumen laporan pelaksanaan Program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital, sebagai berikut:

NO	URAIAN	BANYAKNYA
1	Laporan Akhir Program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital	1 (satu) eksemplar
2	Himpunan Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung (lampiran 1)	1 (satu) eksemplar
3	Dokumen Pembentukan Kelompok Tasumaro (lampiran 2)	1 (satu) eksemplar
4	Laporan Kegiatan Survei dan Investigasi Eksistensi Kawasan Lindung Sahendarumang (lampiran 3)	1 (satu) eksemplar

Demikian disampaikan, mohon maaf atas keterlambatan semua proses, dan atasnya disampaikan terima kasih.

Tahuna, 10 Februari 2017

PERKUMPULAN SAMPIRI
KEPULAUAN SANGIHE
DIREKTUR,



Sampiri
Kepulauan SANGIHE

SAMSARED B. BARAHAMA

KATA PENGANTAR

Setelah melalui proses panjang pelaksanaan program, Perkumpulan Sampiri dapat menyelesaikan semua kegiatan yang direncanakan sebagai bagian pembelajaran bagi lembaga dan masyarakat. Dengan terlaksananya program ini maka patutlah pujian syukur dipanjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa.

Program ini merupakan lanjutan dari suatu proses panjang pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang dan jasa-jasa lingkungan yang menyertainya. Untuk selanjutnya kegiatan pelestarian akan lebih melibatkan masyarakat dan pemerintah kampung, sehingga pada suatu masa akan terbangun kesadaran melakukan pelestarian secara mandiri.

Dengan terselesainya kegiatan ini, Perkumpulan Sampiri Kepulauan Sangihe menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung semua kegiatan. Secara khusus terima kasih disampaikan kepada Burung Indonesia yang telah memfasilitasi sehingga diperolehnya dukungan pendanaan dari Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), dukungan dan kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan dan Tabukan Tengah, pemerintah dan MTK kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng, pimpinan jemaat di lokasi kegiatan, dan pihak lain yang ikut berkontribusi dalam pelaksanaan program.

Aksi pelestarian hutan lindung Sahendarumang akan terus berlangsung dalam semangat kebersamaan dan kemandirian. Harapan kami kiranya kegiatan ini dapat dilanjutkan dan dikembangkan oleh pemerintah dan masyarakat kampung sehingga dapat memberi manfaat bagi kehidupan masyarakat secara berkesinambungan.

Tahuna, Februari 2017

Perkumpulan Sampiri Kepulauan Sangihe

DAFTAR ISI

Cover		
Halaman Judul	i
Pelaksana Program	ii
Surat Pengantar	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
I. PENDAHULUAN	
A. Informasi Program	1
B. Ringkasan	4
II. PELAKSANAAN DAN HASIL	
A. Pelaksanaan	8
B. Hasil	63
III. PROGRAM DAN KEGIATAN LAIN	68
IV. DAMPAK DAN PEMBELAJARAN	88
A. Dampak	
B. Pembelajaran	77
V. PENUTUP	82

LAMPIRAN:

- ❖ Himpunan Peraturan Kampung
- ❖ Dokumen Pembentukan Kelompok Tasumaro
- ❖ Laporan survey dan investigasi eksistensi kawasan lindung Sahendarumang

I. PENDAHULUAN

A. Informasi Program

Latar belakang

Hutan Sahendarumang telah ditetapkan sebagai salah satu kawasan Hutan Lindung di Kepulauan Sangihe. Data tahun 2005, menunjukkan luas hutan alam di Sahendarumang tersisa 350 ha. Sampai saat ini belum ada informasi tentang luas hutan Sahendarumang. Namun secara kasat mata, masih terlihat kegiatan pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Kegiatan ini mengindikasikan bahwa luasan hutan alam di Pegunungan Sahendarumang (hutan lindung) semakin berkurang.

Selain menjaga keseimbangan lingkungan, iklim dan memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan masyarakat di Kepulauan Sangihe, keberadaan Hutan Lindung Sahendarumang menjadi "rumah" terutama bagi jenis-jenis burung khas Sangihe antara lain *Otus collari*, *Aethopyga duyvenbodei*, *Loriculus catamene*, *colluricincla sanghirensis*, *Eutrichomyias rowleyi* dan *Zosterops nehrkorni*. Hutan Sahendarumang menjadi satu-satunya habitat bagi 3 jenis burung terancam punah secara global (kategori kritis) yaitu *colluricincla sanghirensis*, *Eutrichomyias rowleyi* dan *Zosterops nehrkorni*.

Perburuan (dalam skala yang kecil) masih menjadi ancaman bagi burung dan satwa yang hidup dalam kawasan hutan Sahendarumang. Namun, ancaman terbesarnya adalah luasan hutan yang semakin sempit, akibat pembukaan lahan pertanian dan perluasan pemukiman.

Aksi konservasi yang dilakukan awal tahun 2000, mendapat penolakan dari masyarakat kampung sekitar hutan Sahendarumang. Penolakan tersebut dilatarbelakangi oleh proses penetapan batas Hutan Lindung Sahendarumang yang tidak melibatkan masyarakat. Sehingga masyarakat marah dan tidak menerima penetapan batas tersebut.

Walaupun sempat ditolak, pada akhirnya secara perlahan-lahan masyarakat menerima aksi konservasi yang dilakukan karena bermanfaat dirasakan oleh mereka. Pendekatan partisipatif adalah salah satu strategi untuk membantu masyarakat memahami dan menerima lahannya menjadi kawasan lindung. Pengelolaan

lingkungan kampung secara partisipatif dan ramah lingkungan menjadi solusi atas penolakan terhadap kawasan Hutan Lindung.

Program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang merupakan salah satu strategi dalam rangka mengupayakan perlindungan dan pengelolaan hutan Sahendarumang yang dilakukan masyarakat secara partisipatif. Program ini memberi kontribusi dalam mengubah sikap dan perilaku masyarakat agar tidak melakukan pembukaan lahan dalam kawasan hutan lindung dan perburuan satwa.

Kampung yang dipilih sebagai lokasi program merupakan bagian dari KBA Sahendarumang. Untuk melakukan pembenahan dan perbaikan pengelolaan KBA Sahendarumang yang relatif luas dan terdiri dari banyak kampung, memerlukan waktu dan sumber daya yang banyak. Oleh karena itu, bagian kecil dari kawasan hutan lindung Sahendarumang yang tersentuh dengan program, menjadi "contoh dan pembelajaran" bagi kampung lain di sekitar Sahendarumang.

Program akan memberikan visualisasi ruang kampung melalui kegiatan pemetaan partisipatif, dan coba mengarahkan masyarakat melihat kawasan yang dapat dikelola dan mana kawasan yang harus dijaga dan dilindungi. Masyarakat juga diajak untuk memberikan masukan ide-ide pengelolaan kampung, dalam bentuk peraturan kampung.

Program berusaha memberikan kontribusi bagi peningkatan pengetahuan masyarakat di kampung terpilih mengenai pentingnya pelestarian lingkungan, mempengaruhi pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan pemerintah kampung dan lembaga di kampung terutama ketika adaya inisiatif untuk membangun kesepakatan bersama tentang pengelolaan lingkungan alam kampung. Program akan mendorong terbentuknya peraturan kampung, yang akan menjadi payung hukum di kampung dalam melestarikan lingkungan alam kampung. Program juga mengintervensi/mengadvokasi kebijakan, program dan kegiatan stakeholder lain baik di dalam kampung maupun dari luar kampung. Misalnya kebijakan program dari pemerintah kabupaten untuk perluasan lahan pertanian; program memberi masukan agar program tersebut tidak dilakukan di dalam kawasan hutan lindung.

Visi program

Mewujudkan kawasan Hutan Lindung Sahendarumang lestari, yang mendukung pelestarian karagaman hayati dan keberlanjutan jasa lingkungan.

Tujuan Program

Program dilaksanakan untuk menciptakan pengelolaan kampung yang mendukung pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang dan keragaman hayati di dalamnya.

Keluaran program

1. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memahami pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung dan terjadi perubahan perilaku.
2. Adanya Tata Kelola Ruang Kampung dan rencana implementasi yang mendukung pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang dan Keragaman Hayati lokal.
3. Pemerintah dan Masyarakat menyetujui dan melaksanakan Tata Kelola Ruang Kampung.

Strategi

Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi.

Judul program

Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital

Waktu dan lokasi kegiatan

Periode waktu September 2015 – Januari 2016 (5 bulan) Wilayah Sangihe Talud dan Koridor Laut Sulawesi Utara KBA Sahendarumang

Pelaksana

Program dilaksanakan oleh Perkumpulan Sampiri Kepulauan Sangihe bekerja sama dengan Burung Indonesia atas dukungan dana dari *Critical Ecosystem Partnership Fund* (CEPF).

B. Ringkasan

Program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital di Kepulauan Sangihe yang bertujuan untuk menciptakan pengelolaan kampung yang mendukung pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang dan keragaman hayati di dalamnya, sudah dilaksanakan pada bulan September 2015-Desember 2016. Program dilaksanakan di Kampung Malamenggu dan Bukide Kecamatan Tabukan Selatan dan Kampung Pelelangeng Kecamatan Tabukan Tengah.

Kehadiran program disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan, Kecamatan Tabukan Tengah dan pemerintah kampung lokasi program. Komitmen dukungan pemerintah ditunjukkan dengan dukungan program dan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun Anggaran 2016, memfasilitasi kegiatan sosialisasi awal program kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait, dan verifikasi atau pemeriksaan draft peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung. Dukungan pemerintah kecamatan ditunjukkan dengan kehadiran dalam berbagai kegiatan.

Pada saat program ini dimulai, beriringan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana setiap kampung dituntut untuk membuat

dan menyiapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung). Mempelajari Peraturan Menteri dalam negeri No. 144 Tahun 2015 sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, terbuka peluang untuk memasukan inisiatif-inisiatif kegiatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam RPJM Kampung. Kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Puna dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital, sangat relevan dan penting sekali dalam penataan wilayah pemerintahan kampung dan pengelolaan kawasan lindung di kampung. Tata batas kampung yang diwajibkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi pintu masuk yang sangat strategis bagi program untuk mengintegrasikan ide-ide program pelestarian lingkungan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJM Kampung).

Ada tiga keluaran, indikator, dan kegiatan yang hendak dicapai melalui pelaksanaan program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Puna dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital, yaitu:

Keluaran 1. Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memahami pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung dan terjadi perubahan perilaku.

Indikator:

- a. Pemerintah kabupaten memberikan dukungan program pada lokasi proyek pada tahun anggaran 2015 atau 2016 dan membantu memverifikasi PERKAM 3 kampung di tahun 2016;
- b. Pemerintah kecamatan menghadiri beberapa pertemuan yang dilaksanakan poyek di tahun 2015 dan 2016;
- c. Tokoh agama memasukan kegiatan konservasi ditahun pelayanan 2016;

- d. Masyarakat mendukung dan melaksanakan aksi pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang pada saat proyek dilaksanakan dan setelah proyek selesai.

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Sosialisasi awal proyek di pemerintah kabupaten dan kecamatan
2. Sosialisasi awal proyek di kampung
3. Lokalatih pendalaman konservasi kepada Tokoh Agama
4. Pembuatan dan distribusi material kampanye penyadartahuan

Keluaran 2: Adanya Tata Kelola Ruang Kampung dan rencana implementasi yang mendukung pelestarian Hutan Lindung Sahendrumang dan Keragaman Hayati lokal.

Indikator:

Adanya Dokumen Kesepakatan Tata Kelola Ruang Kampung.

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pertemuan kampung membahas tentang pelaksanaan pemetaan partisipatif kampung
2. Pemetaan Partisipatif
3. Pengolahan data
4. Pembahasan hasil pemetaan bersama Tim Pemetaan
5. FGD Perumusan Tata Kelola Ruang Kampung

Keluaran 3: Pemerintah dan Masyarakat menyepakati dan melaksanakan Tata Kelola Ruang Kampung.

Indikator:

Pemerintah dan masyarakat di 3 kampung membentuk peraturan kampung yang disepakati bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Kegiatan yang dilaksanakan:

1. Pembahasan Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung
2. Konsultasi Peraturan Kampung ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten
3. Penetapan Peraturan Kampung oleh pemerintah Kampung bersama Majelis Tua-Tua Kampung
4. Pelembagaan inisiatif Pengelolaan Alam Kampung yang berkelanjutan

Hasil-hasil program antara lain:

1. Pemerintah daerah kabupaten kepulauan Sangihe mengalokasikan program dan dana untuk mendukung pelestarian hutan lindung Sahendarumang melalui APBD tahun 2016.
2. Terbentuknya peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung di kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng.
3. Terbentuknya kelompok pengelola tata ruang kampung di kampung Bukide.
4. Kelompok Elung Banua di Kampung Lelipang kecamatan Tamako aktif kembali.
5. Rancangan Peraturan Kampung Lelipang tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
6. Adanya partisipasi masyarakat dan sekolah dalam mendukung program dan pelestarian lingkungan.
7. Ide-ide kegiatan dalam program, diadopsi menjadi program dan kegiatan yang ditata dalam RPJM Kampung.

II. PELAKSANAAN DAN HASIL

A. Pelaksanaan

Proyek Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Puna dan Jasa-Jasa Lingkungan Yang Vital, bertujuan Menciptakan pengelolaan kampung yang mendukung pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang dan keragaman hayati didalamnya.

Untuk mencapai keluaran 1: Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memahami pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung dan terjadi perubahan perilaku, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

1.1 Sosialisasi awal program pada pemerintah kabupaten dan kecamatan

Kegiatan sosialisasi awal program bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan dilakukan dengan tujuan agar pemerintah kabupaten dan kecamatan mengetahui adanya program dan dapat memberikan dukungan dalam pelaksanaannya.

1. Sosialisasi program kepada pemerintah kabupaten

Kegiatan persiapan dalam rangka sosialisasi program kepada pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe, dilaksanakan pada tanggal 16-17 September 2015, Perkumpulan Sampiri melakukan koordinasi dengan Bpk. Alfried N. Limpong, S.Pi, M.Si kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPPEDA dan ibu Juwita W. N. Rendeo, S.IK Kepala Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya. Dalam koordinasi tersebut Perkumpulan Sampiri menjelaskan rencana sosialisasi proyek dan kedatangan tim Burung Indonesia bersama tim CEPF.



Gambar 1. Ibu Henny dari Burung Indonesia sedang menjelaskan program pelestarian Hutan Lindungan Sahendarumang

Pihak BAPPEDA memberikan saran agar Sampiri membuat surat permohonan kepada Bupati untuk memfasilitasi undangan pertemuan antara SKPD dengan Tim Burung Indonesia dan CEPF.

Saran tersebut ditindaklanjuti oleh Perkumulan Sampiri dengan membuat surat permohonan kepada Bupati tanggal 17 September 2015. Selanjutnya pemerintah kabupaten melalui Sekda dan Asisten bidang Pembangunan dan Ekonomi mendesposisikan surat tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup untuk memfasilitasi pembuatan dan distribusi surat serta mendampingi pertemuan.

Kegiatan sosialisasi program kepada pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe dilaksanakan pada Senin, 21 September 2015 bertempat di Gedung Efrata Inspiration Hall di Tahuna. Sosialisasi yang difasilitasi oleh BLH ini dihadiri oleh Burung Indonesia, tim CEPF, Sampiri, unsur Satuan Kerja

Pemerintah Daerah (SKPD) yaitu, kepala Badan Lingkungan Hidup bersama staf, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, perwakilan dari Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan (BP3K), perwakilan dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Bagian Pemerintahan Desa, dan Media (Koran Nusa Utara).



Gambar 2. Proses diskusi dengan peserta

Dalam kesempatan ini Burung Indonesia dan CEPF diberikan kesempatan untuk menyampaikan hal-hal terkait program dan selanjutnya dibangun diskusi informal terkait isu-isu lingkungan yang terjadi di kepulauan Sangihe. Beberapa catatan yang berkembang dalam diskusi yaitu:

- Badan Lingkungan Hidup:
 - Perlu penguatan masyarakat dalam melalui kegiatan sosialisasi;
 - Perlu disusun peraturan kampung tentang pelestarian lingkungan;
 - Perlu dibangun koordinasi dengan Badan Lingkungan Hidup;
 - Dibeberapa kampung sudah ada peraturan kampung;

- Perlu dilakukan pengkajian kampung dengan metode PRA;
 - Mengembangkan kegiatan budidaya melinjo di kampung Kauhis;
 - Tantangan dengan adanya alih kelola fungsi lahan;
 - Pemerintah daerah mendukung dan sedang membangun program menuju Indonesia hijau;
 - Isu "air" menjadi isu penting dalam melestarikan lingkungan;
 - Program "adhiyata" (sekolah berbasis lingkungan) perlu digalakkan di setiap sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan;
 - Sudah ada sekolah yang mendapat penghargaan "Adhiyata" yaitu sekolah SD di kampung Lenganeng.
 - Pemerintah kabupaten kepulauan Sangihe sedang membangun "Taman Kehati" dengan lokasi di Kekewang kecamatan Kendahe.
- Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan:
- Masih ada konflik antara masyarakat dengan penatabatasan hutan lindung Sahendarumang akibat perbedaan pandangan;
 - Perlu disosialisasikan Undang-Undang tentang konservasi keanekaragaman hayati;
 - Telah dilakukan program reboisasi di kawasan hutan lindung Sahendarumang;
 - Sedang digalakan program perluasan hutan rakyat, dengan kegiatan kebun bibit rakyat;
 - Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi bagi kelompok pemerhati lingkungan, untuk mendukung pemerintah daerah dalam program pelestarian hutan lindung Sahendarumang;

- Perlu ada gerakan pendidikan konservasi bagi siswa dan generasi muda.
- Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral:
 - Pengunungan Sahendarumang perlu dilindungi;
 - Perlu ada perlakuan khusus bagi kawasan Sahendrumang;
 - Melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian Sahendrumang;
 - Perlu adanya alternatif usaha pertanian untuk mengurangi tekanan bagi Sahendarumang;
 - Pemanfaatan lahan dengan menanam pohon buah-buahan;
 - Perlu dibangun program pemantauan lingkungan.
- Dinas Pariwisata:
 - Pembakaran lahan untuk kegiatan pertanian harus dikurangi;
 - Penebangan pohon dipinggir jalan perlu diatur untuk mengurangi kerusakan akibat longsor;
 - Peraturan Bupati menjadi acuan pengelolaan Sahendarumang;
 - Ketika menyusun peraturan kampung hendaknya mengenakan sanksi yang mendidik;

Pada akhir kegiatan sosialisasi, peserta yang mewakili pemerintah berkomitmen membatu suksesnya pelaksanaan proyek Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

2. Sosialisasi kepada pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan

Sosialisasi kepada pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan dilaksanakan pada tanggal 17 September 2015. Sosialisasi dilaksanakan secara informal, yaitu dengan Sekretaris Kecamatan Tabukan Selatan Bapak Drs. George Livingstone Pontoh. Dalam kesempatan tersebut Sampiri menjelaskan tentang program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-jasa Lingkungan yang Vital yang akan dilaksanakan di 2 kampung di kecamatan Tabukan Selatan, sekaligus mengundang pemerintah kecamatan hadir dalam kegiatan sosialisasi di Kampung Malamenggu pada tanggal 21 September 2015.

Pemerintah kecamatan Tabukan Selatan merespon pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dengan baik dan siap mendukung pelaksanaannya, serta bersedia hadir dalam kegiatan sosialisasi di kampung Malamenggu.

3. Sosialisasi kepada pemerintah Kecamatan Tabukan Tengah

Sosialisasi kepada pemerintah Kecamatan Tabukan Tengah dilaksanakan pada tanggal 18 September 2015. Sosialisasi dilaksanakan secara informal, yaitu dengan Bapak Camat dan Sekretaris Kecamatan Tabukan Tengah. Dalam kesempatan tersebut Sampiri menjelaskan tentang program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-jasa Lingkungan yang Vital yang akan dilaksanakan di kampung Pelelangeng. Kepada pak Camat dan Sekretaris kecamatan diundang hadir dalam kegiatan Sosialisasi di Kampung Malamenggu pada tanggal 21 September 2015.



Gambar 3. Koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan Tabukan Tengah

Pemerintah kecamatan Tabukan Selatan merespon pelaksanaan program dan kegiatan dimaksud dengan baik dan siap mendukung pelaksanaannya, namun oleh karena ada kegiatan di tanggal 21 September 2015, pemerintah Kecamatan Tabukan Tengah tidak dapat hadir dalam kegiatan sosialisasi di kampung Malamenggu.

Oleh karena pemerintah kecamatan Tabukan Tengah tidak dapat hadir dalam kegiatan Sosialisasi di kampung Malamenggu, maka Sampiri melakukan koordinasi lagi pada tanggal 30 September 2015, koordinasi dilaksanakan untuk pelaksanaan sosialisasi kegiatan di kampung Pelelangen.

1.2 Sosialisasi awal program di kampung

Sosialisasi awal program dilaksanakan di 3 (tiga) kampung target yaitu kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng. Tujuan dilaksanakan sosialisasi ini adalah agar pemerintah dan masyarakat di kampung

mengetahui adanya program dan diharapkan pemerintah dan masyarakat mendukung dan partisipasi dalam pelaksanaannya.

1. Sosialisasi awal di Kampung Malamenggu

Sosialisasi awal program di kampung Malamenggu, diawali dengan kunjungan koordinasi yang lakukan sebanyak 3 kali yaitu pada tanggal 10 September 2015, 18 September 2015 dan 19 September 2015. Tim Sampiri berkoordinasi dengan kepala kampung. Kunjungan koordinasi ini dilakukan untuk mendiskusikan rencana pelaksanaan program dimana salah satu lokasi yang dipilih adalah kampung Malamenggu, dan menginformasikan kunjungan tim Regional Implementation Team (RIT) dari Burung Indonesia dan CEPF ke Malamenggu.



Gambar 4. Sosialisasi program di Kampung Malamenggu

Pada tanggal 21 September 2015 jam 10.00 bertempat di kantor kampung dilaksanakan sosialisasi program yang dihadiri oleh RIT-Burung Indonesia

(Ibu Henny Sebiring dan Rini Suryani), CEPF (Daniel Rothberg dan Skylar Hurwite), Perkumpulan Sampiri, pemerintah kampung Malamenggu, pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan yang diwakili oleh sekretaris kecamatan, pemerintah kampung Bukide (kepala kampung dan sekretaris kampung) dan masyarakat kampung Malamenggu. Pada pertemuan tersebut terundang pula Camat Tabukan Tengah dan Kepala Kampung Pelelengen. Namun karena ada kegiatan di kecamatan Tabukan tengah, keduanya tidak sempat hadir.

Dalam sosialisasi ini, secara bergantian Burung Indonesia dan CEPF, diberikan kesempatan untuk menjelaskan program yang akan dilaksanakan kurang lebih 1 tahun kedepan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi.

Beberapa catatan hasil diskusi adalah sebagai berikut:

➤ Sekretaris Kecamatan Tabukan Selatan:

- Mengenal kawasan Sahendarumang ada burung khas melalui gambar Manu Niu;
- Perlu melakukan pendekatan kepada tokoh agama dan jemaat melalui sosialisasi di gereja;
- Tidak banyak pejabat yang peduli dengan pelestarian lingkungan apalagi hutan lindung Sahendarumang;
- Program ini sangat baik, karena salah satunya adalah membantu pemerintah kampung membuat RPJM dan RKP.

➤ Kepala Kampung Malamenggu:

- Perlu dibuat ladang percontohan, untuk mengatasi cara bertani ladang berpindah;

- Kegiatan apa saja yang bisa dilakukan di gunung Sahendarumang?
 - Agar kawasan Sahendarumang sudah tidak bisa disentuh, harus ada pengawasan khusus;
 - Perlu ada kepastian luas kawasan hutan lindung di kampung, karena masih berpotensi konflik dengan masyarakat;
 - Kampung Malamenggu menerima dana desa yang cukup besar.
- Masyarakat Malamenggu (Yunius Rumenta):
- Hutan lindung seperti apa?
 - Apakah hutan lindung masih tetap ada?
- Ketua Majelis Tua-Tua Kampung:
- Pembangunan jalan jangan sampai hutan lindung;
 - Perlu ada petugas yang mengawasi;
 - Perlu disepakati batas hutan, karena masyarakat sudah mengusulkan dari batas hutan yang sekarang ditambah 1 km ke arah kampung, sebagai batas hutan yang disepakati dan tidak boleh digarap lagi.
- Kepala Kampung Bukide:
- Kampung Malamenggu dan Bukide menjadi sentra pertanian;
 - Perlu dibangun kerjasama dengan Dinas Pertanian, agar tidak menimbulkan tekanan bagi kawasan hutan lindung;
 - Masyarakat bercocok tanam masih menggunakan system pertanian tradisional;
 - Perlu diperkenalkan model pertanian modern;
 - Pelestarian lingkungan dan Sahendarumang, perlu disosialisasikan lagi kepada masyarakat dan pemerintah;

- Masyarakat dari kampung lain sering masuk dalam kawasan hutan lindung Sahendrumang.
- Sekretaris Kampung Bukide:
 - Masih ada orang yang masuk hutan untuk membuka kebun;
 - Di kampung Bukide sudah ada kegiatan Kebun Bibit Rakyat dan kegiatan reboisasi seluas 60 ha;
 - Perlu ada hutan penyanggah di bawah hutan lindung Sahendarumang;
 - Perlu ada tata ruang kampung yang diperkuat dengan perkam.
 - Perkam dapat diterima dan didampingi.



Gambar 5. Kebersamaan di Kampung Malamenggu

Setelah sosialisasi program, pada 16 Oktober 2015 dilakukan lagi koordinasi dengan kepala kampung Malamenggu untuk menyepakati waktu pertemuan membahas rencana tindak lanjut kegiatan di Malamenggu.

Pertemuan membahas rencana kerja dilaksanakan pada 20 Oktober 2015 dihadiri oleh Kepala kampung, MTK, sekretaris kampung, serta masyarakat, dengan agenda menyepakati jadwal kegiatan, yaitu tanggal 2 Nopember 2015 kegiatan FGD membahas tata kelola ruang kampung dan tanggal 19 Nopember 2015 kegiatan Lokalahat pendalaman konservasi kepada tokoh agama.

2. Sosialisasi di kampung Bukide

Kegiatan sosialisasi program di kampung Bukide diawali dengan kunjungan koordinasi pada tanggal 18 September 2015. Tim Sampiri bertemu dengan sekretaris kampung. Saat kunjungan koordinasi Tim Sampiri menjelaskan rencana program yang akan dilaksanakan di kampung Bukide, dan meminta kesediaan pemerintah kampung untuk memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi program kepada masyarakat, lembaga dan pemerintah kampung. Kunjungan koordinasi ini sekaligus mengundang pemerintah kampung Bukide hadir dalam kegiatan sosialisasi yang akan dilaksanakan di kampung Bukide tanggal 21 September 2016. Oleh karena belum ada kepastian tanggal pelaksanaan sosialisasi di kampung Bukide, maka disepakati kegiatannya menyesuaikan dengan agenda kegiatan kampung setelah mengikuti sosialisasi di kampung Malamenggu.

Pada 29 September 2015, dilakukan kunjungan koordinasi kedua. Koordinasi kedua ini dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan sosialisasi di kampung Bukide. Namun, pemerintah kampung Bukide dan masyarakat sedang berada di areal terjadinya kebakaran lahan. Setelah dikomunikasikan lagi dengan

kepala kampung, disepakati kegiatan sosialisasi dilaksanakan setelah penilaian lomba desa, yaitu tanggal 7 November 2016.



Gambar 6. Sosialisasi di Kampung Bukide

Sosialisasi awal program di kampung Bukide dilaksanakan di balai Kampung Bukide pada Sabtu, 7 November 2015. Sosialisasi dipimpin oleh kepala kampung, dihadiri oleh perangkat pemerintah dan masyarakat kampung Bukide yang berjumlah 23 orang. Dalam kesempatan tersebut Sampiri menjelaskan tentang akan dilaksanakannya program pelestarian hutan lindung Sahendarumang.

Kepala Kampung bapak R. H. Lanongbuka menyambut baik pelaksanaan program ini, dan mengharapkan terbangun kerjasama dengan pemerintah kampung. Kepala kampung meminta masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan program. Kepala kampung memberi apresiasi terhadap program karena bertujuan untuk pembangunan kampung.

3. Sosialisasi di kampung Pelelangeng

Mengawali kegiatan sosialisasi di Kampung Pelelangeng, Sampiri melakukan koordinasi pada tanggal 30 Oktober 2015. Tim Sampiri menemui kepala kampung dan menyampaikan bahwa Kampung Pelelangeng dipilih menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-Jasa Lingkungan yang Vital.



Gambar 7. Sosialisasi di Kampung Pelelangeng

Sampiri menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program. Kepala kampung tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga terbangun diskusi terkait rencana pemetaan Kampung Pelelangeng. Sebelumnya Kepala Kampung Bpk. Julian Talinaung memberitahu bahwa luas Kampung Palelangen adalah 1.200 ha. Beliau masih meragukan luas kampung yang dia sebutkan sebab penentuan luas tidak didasarkan pada perhitungan pemetaan. Oleh sebab itu kepala kampung sangat berharap kegiatan pemetaan kampung dapat dilaksanakan. Kemudian

disepakati kegiatan sosialisasi dilaksanakan pada hari Rabu, 4 November 2015.

Pada hari Rabu, tanggal 4 November 2015 dilaksanakan kegiatan Sosialisasi proyek di Kampung Pelelangeng. Kegiatan dilaksanakan di balai Kampung Pelelangeng, dihadiri oleh kepala kampung, perangkat Kampung Pelelangeng dan masyarakat yang berjumlah 14 orang.

Dalam kesempatan tersebut, Sampiri menjelaskan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan di Kampung Pelelangeng. Selanjutnya berkembang dalam diskusi tentang teknis pelaksanaan pemetaan kampung. Beberapa orang peserta juga memberikan masukan tentang pentingnya menindak tegas orang-orang yang merusak hutan.

Akhirnya kegiatan sosialisasi ditutup dengan kesepakatan kegiatan pemetaan dimulai bulan Januari 2016 pada minggu ke dua, karena sampai akhir tahun 2015 pemerintah dan masyarakat sedang menyelesaikan pekerjaan yang didanai oleh alokasi dana Kampung.

1.3 Loklatih pendalaman konservasi kepada tokoh agama

Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mengingatkan kembali peran gereja dalam menyuarkan aksi pelestarian lingkungan sebagai bagian tanggung jawab iman dalam memelihara ciptaan Tuhan. Loklatih dilaksanakan dengan mengangkat tema "Memuliakan dan Mengagungkan Allah melalui ciptaan" dan sub tema "Melestarikan Lingkungan Hidup adalah ibadah". Oleh karena kegiatan ini melibatkan beberapa gereja, maka untuk

mempermudah koordinasi, Sampiri meminta dukungan pemerintah kampung untuk memfasilitasi pelaksanaannya.

1. Lokalah di Kampung Malamenggu

Kegiatan diawali dengan koordinasi Sampiri dengan Kepala Kampung pada tanggal 7 Oktober 2015. Koordinasi ini dimaksudkan untuk:

- mempelajari kondisi kehidupan jemaat-jemaat di kampung Malamenggu;
- meminta kesediaan pemerintah kampung sebagai penyelenggara kegiatan lokalah;
- meminta kesepakatan waktu dan lokasi pelaksanaan
- meminta rekomendasi/petunjuk kepala kampung, kepada siapa Sampiri harus berkoordinasi terkait kegiatan lokalah ini.

Dari koordinasi tersebut dihasilkan:

- informasi bahwa dalam masyarakat di Kampung Malamenggu terdapat denominasi pemeluk agama kristen yaitu Jemaat GMIST Golgota, GPdI Jemaat Bukit Sinai, GMPU Jemaat Sion Bela'e, GMPU Jemaat Bukit Karmel, dan GKMII Jemaat ballau.
- pemerintah kampung siap menjadi penyelenggara dan memfasilitasi proses kegiatan Lokalah;
- lokasi pelaksanaan lokalah di gedung ibadah jemaat GMIST Golgota. Gedung ibadah jemaat GMIST Golgota dipilih sebagai lokasi kegiatan mengingat ruang ibadah Jemaat GMIST Golgota cukup representative untuk menampung peserta dan cukup memadai sarana pendukung pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya Sampiri diarahkan kepada ketua Jemaat GMIST Golgota. Dengan ketua Jemaat GMIST Golgota, pembicaraan diawali dengan penjelasan program Sampiri karena pada saat dilaksanakan sosialisasi proyek di kampung, ketua Jemaat GMIST Golgota tidak hadir.

Ketua Jemaat GMIST Golgota setuju dilaksanakan kegiatan loklatih pendalaman konservasi bagi tokoh-tokoh agama yang pelaksanaannya di gedung ibadah Jemaat GMIST Golgota.

Pada saat itu belum ditentukan waktu yang tepat untuk pelaksanaan loklatih, karena ketua Jemaat GMIST Golgota harus berkoordinasi dengan anggota Badan Pekerja Majelis Jemaat GMIST Golgota dan pemerintah kampung.

Pada tanggal 16 Oktober 2015 dilakukan koordinasi yang kedua. Kali ini Sampiri bertemu dengan Kepala Kampung dan Ketua Jemaat GMIST Golgota di rumah kepala kampung. Agenda yang dibahas adalah: Waktu pelaksanaan, peserta, undangan, acara dan konsumsi.

Hasil koordinasi waktu pelaksanaan loklatih hari Kamis, tanggal 12 November 2015, kegiatan dilaksanakan sehari mulai jam 09.00-16.00. Peserta untuk masing-masing jemaat diatur menurut presentasi anggota jemaat, yaitu utusan jemaat GMIST Golgota 50 orang, GPdI Jemaat bukit Sinai 3 orang, GMPU Jemaat Sion Bela'e 5 orang, GMPU Jemaat Bukit Karmel 3 orang, dan GKMIJ Jemaat ballau 5 orang. Undang disiapkan oleh pemerintah kampung dan didistribusikan tanggal 8 Oktober 2015. Undangan untuk narasumber disiapkan oleh Sampiri. Acara diatur sebagai berikut: ibadah pembukaan oleh pendeta dan sambutan pembuka dan penutup oleh kepala kampung,

sedangkan proses lokaltih diserahkan kepada Sampiri. Konsumsi lokaltih diatur oleh majelis jemaat GMIST Golgota.



Gambar 8. Lokaltih di Kampung Malamenggu

Lokaltih Pendalaman Konservasi bagi tokoh Agama dan Tua-tua Jemaat Kampung Malamenggu dilaksanakan pada hari Kamis, 12 November 2015, dihadiri oleh 33 (tiga puluh tiga) orang dari 5 (lima) jemaat denominasi di Kampung Malamenggu yaitu Jemaat GMIST Golgota Malamenggu, GMPU Jemaat Sion Bela'e, GMPU Jemaat Bukit Karmel, GPdI Jemaat Bukit Sinai, dan GMKII Jemaat Balau Malamenggu. Materi yang disampaikan dalam lokaltih adalah:

- Tema I. Ekosistem Kepulauan Sangihe dan Manfaatnya;
- Tema II. Motivasi diri melestarikan lingkungan hidup;
- Tema III. Melestarikan lingkungan hidup adalah Ibadah;
- Tema IV. Gerakan Gereja dalam Melestarikan Lingkungan hidup.

Susunan acara lokaltih adalah sebagai berikut:

- Persiapan dan registrasi peserta (07.00-08.00)

- Pembukaan (08.00-08.15)
 - Salam jumpa oleh Ketua Jemaat GMIST Golgota Malamenggu
 - Ibadah Pembukaan oleh pendeta wilayah pelayanan di jemaat GMIST Golgota Malamenggu
 - Sambutan Pembukaan oleh Kapitalaung Malamenggu
 - Snack
 - Materi tema I disampaikan oleh Sam Barahama (Sampiri)
 - Materi tema II disampaikan oleh Drs. George Livingstone Pontoh (Sekertaris Kecamatan Tabukan Selatan Bapak)
 - Materi tema III disampaikan oleh Pdt. H. D. Sasenga, S.Th (Badan Pekerja Majelis Resort Tabukan Selatan)
 - Materi tema IV disampaikan oleh Sampiri,
- Kemudian loklatih ditutup oleh kapitalaung malamenggu.

2. Loklatih di Kampung Bukide

Koordinasi persiapan pelaksanaan loklatih di Kampung Bukide dilaksanakan 2 (dua) kali pada tanggal 8 Nopember 2015 dan tanggal 19 November 2016. Pada saat berkoordinasi dengan ketua Jemaat GMIST Dolorosa Bukide, tanggal 8 Nopember 2016, Sampiri menjelaskan maksud, tujuan, materi dan teknis pelaksanaan loklatih. Setelah mendengarkan penjelasan dari Sampiri, ketua jemaat memberi saran karena materinya bersifat umum, sebaiknya penyampaian materi tidak terbatas kepada tokoh agama saja, melainkan kepada semua warga di Kampung Bukide, dan pelaksanaannya pada hari Minggu, tanggal 22 November 2015. Setelah berdiskusi dan

mempertimbangkan saran dari ketua Jemaat, maka diputuskan pelaksanaan loklatih tanggal 22 November 2015 bertempat di gedung ibadah.

Pada tanggal 19 November 2015, Sampiri kembali berkoordinasi dengan ketua jemaat untuk memastikan pelaksanaan kegiatan loklatih. Dari koordinasi tersebut disepakati tanggal pelaksanaan kegiatan tidak berubah yaitu tanggal 22 November 2015.



Gambar 9. Tanya Jawab Loklatih di Kampung Bukide

Loklatih Pendalaman Konservasi bagi tokoh Agama dan Tua-tua jemaat, dilaksanakan di Jemaat GMIST Dolorosa Bukide pada hari Minggu 22 November 2015 yang dihadiri oleh 63 orang anggota jemaat. Materi yang bertemakan melestarikan lingkungan hidup adalah Ibadah oleh Pdt. Ibu H. D. Sasenga, S.Th dibawahkan dalam bentuk khotbah dalam ibadah minggu pagi pada pukul 09.00-11.30, kemudian setelah makan siang pada pukul 13.00 dilanjutkan materi oleh bapak Drs. George Livingstone Pontoh dengan tema

Motivasi diri melestarikan lingkungan hidup, setelah itu materi Konservasi oleh Geonal Pontoh, M.Si.

3. Loklatih di kampung Pelelangeng



Gambar 10. Ibadah Pembukaan Lokalatih di Kampung Pelelangeng

Tanggal 23 Februari 2016 Informasi dari kepala kampung lewat telpon bahwa sebagian besar masyarakat kampung Pelelangeng tergabung pada Jemaat GMIST yang terletak di Kampung Bungalawang, sedangkan di Kampung Pelelangeng terdapat 2 jemaat yaitu GPdI dan KGPM. maka koordinasi dilakukan di jemaat GPdI yang kebetulan salah satu Pimpinan jemaatnya merupakan sekretaris kampung. Awal pembicaraan menjelaskan tujuan dilakukannya lokalatih dan dilanjutkan dengan penentuan waktu dan tempat pelaksanaan. Menurut ibu sekretaris kampung, waktu pelaksanaan lokalatih sebaiknya minggu terakhir bulan Februari agar tidak teburu-buru dan biasa dikoordinasikan ke pimpinan jemaat yang lain. Lokasi kegiatan rencana

dilaksanakan di kantor kampung karena melihat luas ruangan sangat memadai, bisa menampung 30-50 orang. Untuk kepastian tanggal pelaksanaan akan dilakukan koordinasi lagi.

Lokalatih dilaksanakan pada tanggal 24 Februari bertempat di balai kampung Pelelangeng dihadiri oleh 47 orang tua-tua jemaat dan tokoh agama diantaranya penatua, diaken, ketua jemaat dan majelis jemaat.

- Kegiatan dimulai jam 08.00 yang diawali dengan sapaan salam jumpa dari Pengarah Acara
- Ibadah pembukaan dilayani oleh bapak A. Laurens (ketua jemaat KGPM Banalang Duata)
- Sambutan Pembukaan dari Bapak Willian E.J.Jaling (Kapitalaung Pelelangeng) dalam sambutannya Kapitalaung mengapresiasi kegiatan ini sehingga beliau menghimbau kepada masyarakat agar mendukung program Sampiri di kampung pelelangen
- Pada jam 09.45 kegiatan dilanjutkan dengan materi Tema I. Melestarikan Lingkungan Hidup adalah Ibadah.

Ringkasan materi:

“Dasar pemahaman Alkitabiah mengenai alam semesta adalah cerita ciptaan yang tertulis dalam Kitab Kejadian (Pasal 1 dan 2). Jelas ditunjukkan bahwa alam semesta atau dunia dengan segala isinya adalah ciptaan Allah dan karena itu semua ciptaan adalah milik Allah. Alam semesta yang diciptakan Tuhan terdiri dari berbagai unsur, seperti bumi atau tanah, air, udara/angin, tumbuhan, hewan dan manusia. Menurut Alkitab, manusia

merupakan ciptaan yang istimewa. Untuk itu gereja atau kumpulan orang beriman kepada Kristus, memiliki dasar dan dorongan untuk usaha pemeliharaan dan pelestarian alam. *Pertama* kelestarian alam adalah kebutuhan manusia atau gereja (hak ekonomis) yang tentu secara terus menerus membutuhkan hasil yang baik dan indah dari alam ini. *Kedua*, adanya tugas karena kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada manusia atau gereja. *Ketiga*, menjaga kelestarian dan keindahan alam adalah bagian dari iman yaitu sebagai kesaksian dari orang-orang yang diselamatkan, yang juga bertanggung jawab untuk membuat lingkungan hidup menjadi tempat orang merasakan keselamatan itu.

Tanya jawab. Bapak N. Makawoel: "apa kaitannya taman eden dengan dosa bagi manusia?" Jawab: manusia diciptakan oleh Tuhan, dan ditempatkan di taman Eden. Taman Eden adalah taman yang paling indah yang Tuhan ciptakan bagi manusia. Manusia berdosa karena melanggar perintah Tuhan di taman Eden.

- Jam 10.50 penyajian Materi III. Ekosistem Kepulauan Sangihe

Di kepulauan Sangihe terdapat ekosistem air: laut, laut dangkal, dan mangrove, ekosistem sungai, ekosistem darat. Ekosistem membentuk rantai makanan.

Dalam ekosistem terdapat keragaman hayati. Manfaat keragaman hayati antara lain: menjadi sumber bahan makanan, sumber bahan bangunan dan industri, pengembangan pendidikan, budaya dan pariwisata, sumber air dan energi dan penyeimbang iklim.

Tanya Jawab. Kapitalaung: "apa sebenarnya yang dimaksud dengan illegal login?" Jawab; illegal login itu adalah kegiatan ata usaha penebangan pohon secara illegal atau tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat. Bapak Daniel Mamuno: "kalau saya mau menebang pohon di lahan sendiri, apakah harus memiliki ijin?" Jawab: penebangan pohon di lahan sendiri sebenarnya harus memiliki ijin, minimal permohonan ijin atau pemberitahuan kepada kepala kampung. Pemberian ijin tergantung kebijaksanaan dari kampung.

- Materi dilanjutkan dengan Materi tema IV. Gerakan Gereja dalam Melestarikan Lingkungan Hidup



Gambar 11. Penyampaian Materi Loklatih Kampung Pelelangeng

Dalam penyajian materi ini peserta dibagi 3 kelompok, yaitu: kelompok GPdI, Kelompok KGMP, dan Kelompok GMIST. Masing-masing kelompok diberi tugas: Pertama: mengidentifikasi masalah atau kekurangan dalam gereja terkait pelestarian lingkungan. Kedua: mengidentifikasi solusi yang

bisa dilakukan gereja. Ketiga: kegiatan/kiat-kiat apa yang bisa dilakukan gereja untuk menindaklanjuti solusi yang sudah teridentifikasi.

Setelah berdiskusi masing-masing kelompok memaparkan hasil diskusi kelompoknya. Dibawah ini adalah kiat-kiat atau kegiatan yang dapat dilakukan gereja dalam melestarikan lingkungan hidup, yaitu:

GPdI: 1) membuat tempat sampah dan mengarahkan warga jemaat untuk membuang sampah pada tempatnya; 2) mengarahkan serta membantu warga jemaat membuat kandang ternak dan saptik tank pembuangan limbah.

KGPM: 1) program jumat bersih melibatkan warga jemaat bekerjasama dengan pemerintah kampung; 2) mengarahkan warga jemaat agar tidak menebang pohon yang berada di daerah rawan longsor; 3) membuat jamban untuk keluarga yang belum memiliki jamban.

GMIST: 1) menanam pohon di sekitar sungai dan mata air; 2) bekerjasama dengan pemerintah kampung menyepakati peraturan pengurangan penggunaan senjata angin; 3) pemberdayaan masyarakat.

- Pada pukul 13.30 pemaparan Materi tema II. Motivasi diri melestarikan lingkungan hidup.

Tanya jawab. N. Makawoel: "Disekeliling kita satwa yang ada sudah 90% punah, apakah Perkumpulan Sampiri dapat mengembalikan satwa tersebut?" Jawab: Perkumpulan Sampiri tidak dapat mengembalikan satwa yang sudah punah tapi dapat mengarahkan kepada kita semua untuk melestarikan yang masih ada. Kapitalaung: "Dulu masih banyak pisang hote (pisang Abaca) yang kulitnya sering dimanfaatkan sebagai bahan

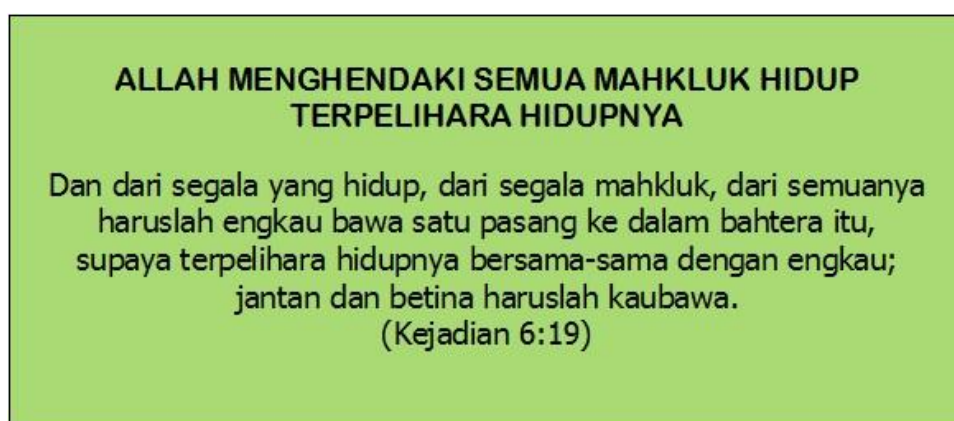
utama pembuatan kain kofo (Kain khas sangihe), kalau sekarang sudah kurang, bagaimana mengembalikan hutan yang didalamnya ada pisang hote seperti sedia kala?” Jawab: kita bicarakan dengan masyarakat yang memiliki lahan yang baik untuk habitat pisang hote, kemudian mencari bibit pisang hote lalu menanam pisang hote di lahan masyarakat dengan kesepakatan jangan ditebang.

- Kegiatan ditutup oleh Kapitalaung.

1.4 Pembuatan dan distribusi material kampanye penyadartahuan

Pada bulan Desember 2016 program membuat 3 (tiga) jenis material kampanye, yaitu pembatas, poster 6 (enam) versi dan peta kampung. Masing-masing jenis dicetak dengan jumlah: pembatas buku sebanyak 1000 lembar, poster 6 versi dicetak 9 buah tiap versi semuanya berjumlah 54 lembar, dan peta kampung dicetak 3 lembar tiap kampung.

Pesan yang disampaikan dalam pembatas buku di kutip dari isi Alkitab yaitu:



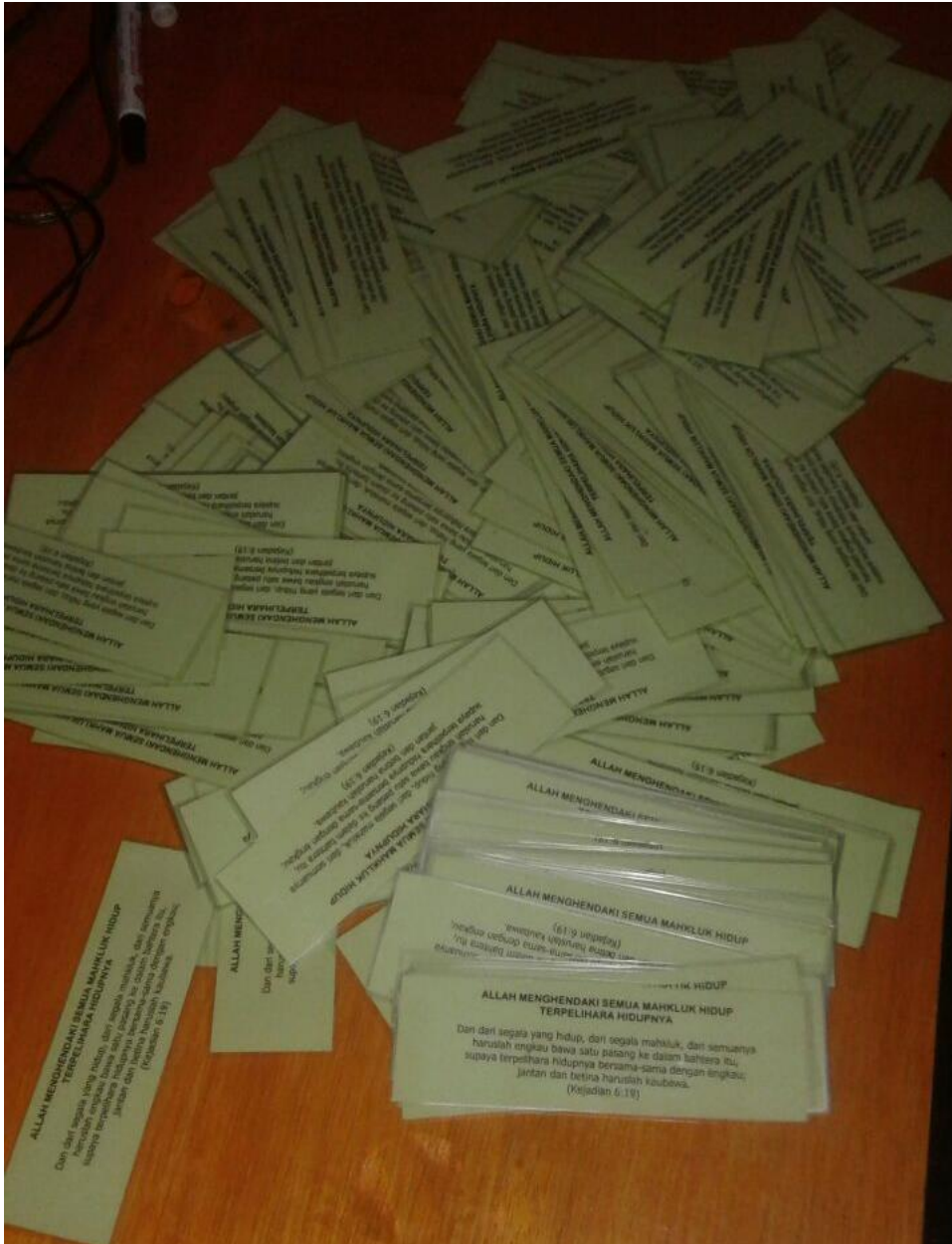
Gambar 12. Konsep Pembatas Buku

Sedangkan pada poster, 2 (dua) pesan yang disampaikan, untuk gereja dan masyarakat umum, yaitu:

Material kampanye sudah didistribusi kepada masyarakat terutama di 3 (tiga) kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng.



Gambar 13. Poster



Gambar 14. Pembatas Buku

Untuk mencapai keluaran 2: Adanya Tata Kelola Ruang Kampung dan rencana implementasi yang mendukung pelestarian Hutan Lindung Sahendrumang dan Keanekaragaman Hayati lokal, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

2.1 Pertemuan kampung membahas tentang pelaksanaan pemetaan partisipatif kampung

Pertemuan persiapan pemetaan kampung ini dilakukan dengan pemerintah kampung dan tim pemetaan yang sebelumnya sudah ditunjuk atau ditetapkan oleh kepala kampung.

Persiapan ini dimaksudkan untuk menyamakan persepsi tentang pekerjaan pemetaan yang akan dilakukan. Hal-hal yang disampaikan dan didiskusikan bersama pemerintah kampung dan tim pemetaan antara lain:

- Maksud dan tujuan dilakukannya pemetaan kampung.
- Lingkup pekerjaan pemetaan.
- Teknis pengambilan data, pemberian tanda dan penggunaan alat bantu pemetaan.
- Jadwal dan strategi pengambilan data.

1. Persiapan di kampung Malamenggu

Koordinasi dilaksanakan tanggal 16 Oktober 2015, untuk menyepakati jadwal pertemuan membahas rencana kegiatan pemetaan kampung. Pertemuan disepakati akan dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2015.

Pertemuan dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 dihadiri oleh pemerintah kampung dan tokoh masyarakat. Agenda pertemuan antara lain:

- Menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemetaan kampung.
- Menjelaskan lingkup pemetaan.
- Menjelaskan teknis pengambilan data, pemberian tanda dan penggunaan alat bantu pemetaan.
- Menyetujui jadwal dan strategi pengambilan data.
- Pembentukan tim pemetaan.
- Pembahasan persiapan dan perlengkapan pemetaan.

Hasil pertemuan:

- Diketahui bahwa kampung Malamenggu, berbatasan dengan kampung Lesabe, Lesabe I, Bukide, Lelipang, Pindang, Basauh, Birahi dan Kalagheng.
- Kepala kampung dan kepala dusun akan mengunjungi pemerintah 8 (delapan) kampung ini untuk menjelaskan rencana kegiatan pemetaan batas kampung dan meminta kesediaan pemerintah dan masyarakat setempat mendampingi tim pemetaan kampung Malamenggu, ketika tim ini sudah berada di lokasi yang berbatasan dengan kampung mereka. Hal ini dilakukan untuk memperoleh kesepakatan bersama batas kampung dengan kampung tetangga.
- Lingkup pengambilan data peta adalah: batas kampung, batas dusun, lokasi mata air, objek wisata, sarana prasarana umum, pemukiman, hutan, dan hutan penyanggah, lahan pertanian dan perkebunan.
- Kepala kampung menunjuk Tim Pemetaan, yang terdiri dari unsur pemerintah kampung, kepala dusun, pengurus MTK, dan beberapa masyarakat yang paham dan mengetahui batas kampung.
- Jadwal pemetaan disepakati mulai tanggal 18 Oktober 2016, dan selanjutnya jadwal ditentukan sesuai kondisi dan kesibukan kegiatan pembangunan kampung.

2. Persiapan di kampung Bukide

Sebelum pelaksanaan pemetaan kampung Bukide, pada tanggal 5 Desember 2015 diadakan pertemuan dengan pemerintah kampung dan tokoh-tokoh masyarakat bertempat di rumah sekretaris kampung. Agenda pertemuan antara lain:

- Menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemetaan kampung.
- Menjelaskan lingkup pemetaan.
- Menjelaskan teknis pengambilan data, pemberian tanda dan penggunaan alat bantu pemetaan.
- Menyetujui jadwal dan strategi pengambilan data.
- Pembentukan tim pemetaan.
- Pembahasan persiapan dan perlengkapan pemetaan.

Hasil pertemuan antara lain:

- Diketahui bahwa kampung Bukide sudah memiliki peta digital yang dilakukan beberapa tahun sebelumnya. Namun file elektroniknya tidak dimiliki kampung.
- Karena sudah ada peta digital, disepakati tim hanya melakukan pengambilan data pada bagian-bagian yang belum termuat dalam peta kampung yang ada.
- Kampung Bukide berbatasan dengan kampung Lesabe I, Bentung, Bowongkali, Ulung Peliang, Malamenggu.
- Pengambilan data lebih terfokus pada pemenuhan informasi tentang rencana penyusunan tata kelola ruang kampung.
- Disepakati tim pemetaan.

- Disepakati jadwal pemetaan mulai tanggal 8 Desember 2015.

3. Persiapan di kampung Pelelangeng

Pertemuan persiapan kegiatan pemetaan di kampung Pelelangen dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2016. Pertemuan persiapan dilaksanakan di kantor kampung, dipimpin oleh kepala kampung. Hadir dalam pertemuan unsur pemerintah kampung, Majelis Tua-Tua Kampung, kepala dusun, dan masyarakat.

Agenda pertemuan antara lain:

- Menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemetaan kampung.
- Menjelaskan lingkup pemetaan.
- Menjelaskan teknis pengambilan data, pemberian tanda dan penggunaan alat bantu pemetaan.
- Menyetujui jadwal dan strategi pengambilan data.
- Pembentukan tim pemetaan.
- Pembahasan persiapan dan perlengkapan pemetaan.

Hasil pertemuan antara lain:

- Kepala kampung mengulangi lagi keinginannya memiliki peta kampung, supaya diketahui wilayah dan luas kampung.
- Kepala kampung menghimbau kepada semua yang hadir agar melaksanakan pemetaan ini dengan baik, karena merupakan kebutuhan kampung.

- Diketahui kampung Pelelangeng berbatasan dengan kampung Bunglawang, Miulu, Manumpitaeng, Hiung, Ulung Peliang, Bira, Kuma dan Kuma I.
- Kepala kampung dan perangkat kampung akan mengunjungi kampung tetangga untuk menyampaikan rencana pemetaan kampung, dan minta kesediaan dan kerjasama mereka untuk membantu bersama-sama menunjukkan batas kampung. Maksudnya untuk menghidari terjadinya perselisihan batas kampung.
- Pengambilan data mencakup: batas kampung, batas dusun, sarana prasarana umum, tempat-tempat khusus.
- Disepakati teknis penelusuran batas.
- Disepakati jadwal pelaksanaan pemetaan dimulai tanggal 15 Februari 2016.

2.2 Pemetaan Partisipatif

1. Pemetaan kampung Malamenggu

Pemetaan dimulai tanggal 18 Oktober 2015, namun karena cuaca hujan, pengambilan data tidak dapat dilaksanakan. Pengambilan data dilanjutkan pada hari Jumat 6 November 2015 dengan anggota tim dari kampung sebanyak 8 orang. Sebelum penelusuran batas tim pemetaan berdiskusi terlebih dahulu untuk teknis perjalanan. Pengambilan data hari pertama adalah merekam track jalan dan titik lokasi penting di desa dan mata air dan sebagian batas desa.

Pengambilan data hari kedua dilaksanakan pada tanggal 17 November 2015. Agar pengambilan data efektif dan efisien, tim pemetaan di bagi 3 kelompok dengan tugas yang berbeda. Hari kedua terfokus pada pengambilan titik batas sisi barat, timur dan selatan, titik sarana umum di kampung, serta batas hutan dan kebun.



Gambar 15. Pengambilan data lapangan di Malamenggu

- Hari ketiga tim tetap di bagi tiga untuk menelusuri sisa batas yang belum diambil, serta sebagian trak jalan yang ada di kampung, sungai dan fasilitas umum di kampung dan pemukiman.

2. Pemetaan kampung Bukide

Pemetaan kampung Bukide dilaksanakan tanggal 8 - 11 Desember 2016. Proses pemetaan agak berbeda dengan pemetaan di kampung Malamenggu dan Pelelangeng. Di kampung Bukide, tim pemetaan

menelusuri lagi jejak pemetaan sebelumnya sambil mengambil titik-titik yang belum di ambil pada pemetaan sebelumnya.

3. Pemetaan Kampung Pelelangeng

- Pemetaan Kampung Pelelengen hari pertama dilaksanakan tanggal 15 Februari 2016 diikuti oleh kepala kampung Pelelangeng Bapak Julian Talinaung beserta dengan perangkat kampung, dan mengundang perangkat kampung Bungalawang, Bira, Kuma, Miulu. Jumlah tim keseluruhan adalah 8 orang.



Gambar 15. Pengambilan data titik 0 di Pelelangeng

Titik awal (titik 0) pengambilan data adalah jembatan yakni batas antara Pelelengen dengan Bungalawang dan Kuma. Selanjutnya tim berjalan menyusuri batas kampung. Setiap batas yang sudah disepakati diberikan tanda cat warna merah untuk pemasangan patok batas.

Kemudian perjalanan dilanjutkan mengambil titik batas antara Kampung Pelelengen dengan Miulu, Pelelengen dengan Hiung sampai ke lokasi yang disebut di Mesele Masana. Setiap titik yang strategis di berikan tanda dengan patok batas.



Gambar 16. Pengambilan data titik batas kampung

- Pemetaan hari kedua dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2016. Anggota tim yang ikut 4 orang. Tim menyusuri batas Pelelangeng dengan Kuma I dan Bira, sampai ke lokasi yang disebut mesele marange.

Setelah pemetaan hari kedua, kegiatan pemetaan dihentikan sementara waktu sampai kondisi aman. Sebab ada buronan pembunuhan yang belum tertangkap dan disinyalir bersembunyi berpindah-pindah di sekitar kebun dan hutan.

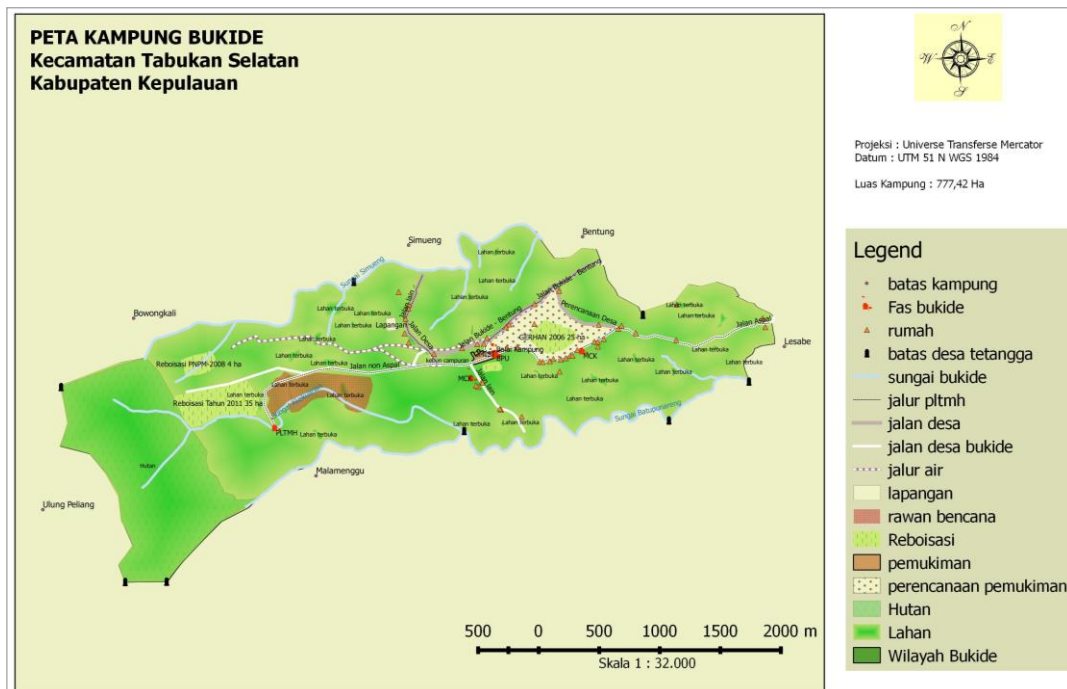
- Pemetaan hari ketiga dilaksanakan pada tanggal 16 April 2016 dengan jumlah anggota Tim 4 orang. Pemetaan dilakukan mengambil titik

sungai, mata air, bak air penampung, jalan produksi, gedung ibadah, pustu, dan TPU. Tim dibagi dua, karena kampung Pelelangeng memiliki dua lindungan. Pengambilan trak batas lindungan diambil bersama kemudian tim berpencaar, untuk mengambil titik-titik vital yang ada di lindungan I dan II.

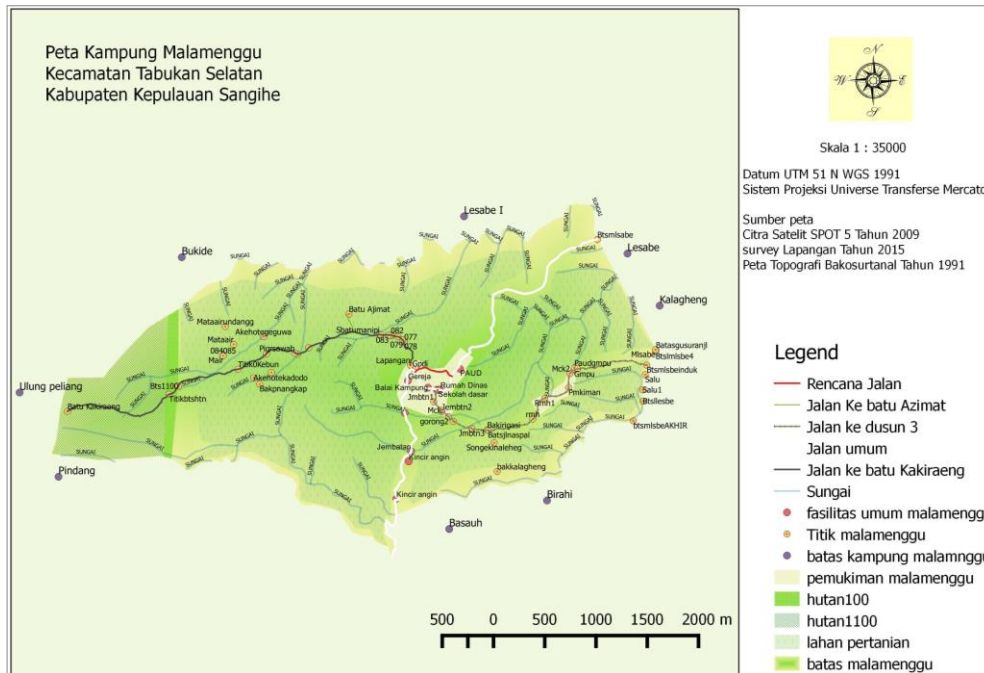
2.3 Pengolahan data

Data hasil pemetaan yang terekam dalam Global Positioning System (GPS), kemudian ditransfer ke perangkat komputer. Data dalam bentuk file digital kemudian diolah menggunakan program arcview dan Qgis. Untuk membantu pengolahan data, digunakan peta RBI Bakosultanal tahun 1991 dan Citra satelit spot 5.

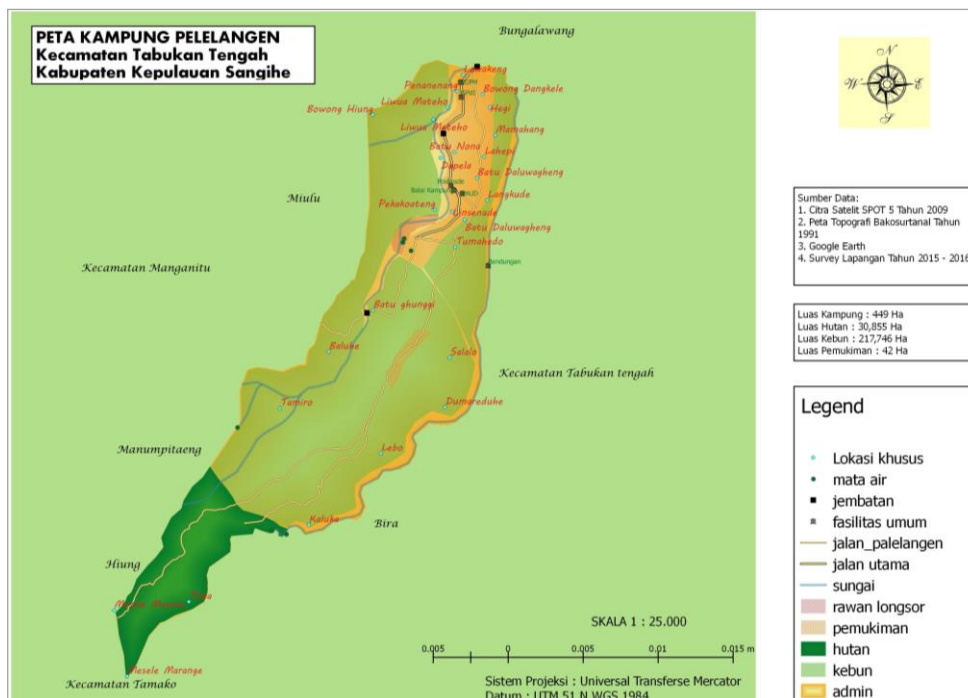
Hasil pengolahan data tersebut berupa gambar peta kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng.



Gambar 17. Gambar Peta Kampung Bukide



Gambar 18. Gambar Peta Kampung Malamenggu



Gambar 19. Gambar Peta Kampung Pelelangen

2.4 Pembahasan hasil pemetaan bersama Tim Pemetaan

Pada bulan November dilakukan konsultasi hasil pengolahan data pemetaan, dengan pemerintah kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangen secara terpisah di kampung masing-masing. Konsultasi ini maksudkan agar pemerintah

kampung melihat dan membandingkan hasil pengambilan data di lapangan dengan hasil pengolahan data. Dari konsultasi tersebut tidak ada perubahan signifikan pada gambar peta. Hanya merapikan penulisan dan memasukkan titik-titik tertentu yang belum termuat dalam gambar peta. Setelah dikonsultasikan, kemudian peta di cetak dan diserahkan kepada pemerintah kampung.

Kecuali Kampung Pelelangeng yang sebelumnya melaporkan luas wilayah kampung 1.200 ha, setelah dilakukan pemetaan diperoleh data luas wilayah kampung Pelelangeng sebesar 449 ha. Kepala kampung Lelipang menerima data ini sebagai data akurat yang dapat dipercaya, dan selanjutnya akan menjadi referensi untuk digunakan dalam dokumen-dokumen resmi.



Gambar 20. Pembahasan hasil pemetaan

2.5 FGD Perumusan Tata Kelola Ruang Kampung

Dari koordinasi persiapan FGD kampung Malamunggu , Bukide dan Pelelangeng, disepakati:

- FGD di Kampung Malemunggu, akan dilaksanakan pada tanggal 20 November 2015, dan peserta 15 orang.

- FGD di Kampung Bukide, akan dilaksanakan pada tanggal 20 Januari 2016, dan akan mengundang tokoh masyarakat dan aparat desa.
- FGD di kampung Pelelangeng, akan dilaksanakan tanggal 10 Februari 2016.

1. FGD di Kampung Malamenggu

FGD di kampung Malamenggu dilaksanakan pada tanggal 20-24 November 2015.

FGD dilaksanakan di rumah kepala kampung. FGD lebih menggali potensi kampung disetiap ruang kampung. Hasil FGD adalah sebagai berikut:

Ruang Kampung	Potensi
Wilayah administratif	<ul style="list-style-type: none"> - Luas wilayah Malamenggu adalah 1.107 ha. - Batas wilayah: di sebelah Utara berbatasan dengan Bukide; di sebelah Timur berbatasan dengan Lesabe dan Lesabe I, di sebelah tenggara berbatasan dengan Kalagheng; di sebelah Barat berbatasan dengan Basauh dan Birahi; di sebelah Barat Daya berbatasan dengan Pindang dan di sebelah Barat berbatasan dengan Lelipang. - Kampung Malamenggu secara administratif terbentuk tahun 1943, dipimpin oleh Kapitalaung - Wilayah administratif terbagi atas 3 Lindongan: lindongan I. Akeu Hote, Lindongan II. Manalede, dan lindongan III. Belae.
Hutan	<ul style="list-style-type: none"> - Malamenggu masuk kawasan hutan lindung. - Hutan primer yang disepakati adalah 1 km dari Batu Kakiraeng - Bentihu Bulu ke arah pusat kampung. - Hutan penyanggah 100 dari batas hutan primer ke arah kampung. - Potensi sumber daya alam berupa jenis pohon, flora, yang lain seperti rotan, rotan tikus, uahe, kantung semar akis aneka anggrek. - Dalam hutan terdapat jenis satwa: mamalia, jenis burung, seranga, binatang melata dan jenis satwa lainnya.
Sungai	<ul style="list-style-type: none"> - sungai, hewan yang hidup disungai, jumlah mata air, dan bagaimana cara pengelolaannya
Lokasi cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> - Di kampung Malamenggu ada beberapa tempat wisata yang baik untuk dikembangkan dan dikelola diantaranya cagar budaya batu agimate yang merupakan batu yang berbentuk pulau sangihe, Mala maenggu, tampa lawakeng, kincir angin, batu kakiraeng.
Lahan Pertanian dan perkebunan	<ul style="list-style-type: none"> - Luas lahan perkebunan kurang lebih 400 ha. - Komoditi yang ditanam didominasi cengkeh, kelapa, pala. - Produksi cengkeh rata-rata tiap 3 tahun sekali. - Ada 150 kepala keluarga yang menanam cengkeh, produksi per sekali panen rata-rata 4 ton. - Cengkeh dijual kering.

	<ul style="list-style-type: none"> - Ada 150 kepala keluarga memiliki tanaman Kelapa, produksi dalam setahun 8 ton untuk 2 kali panen. Kelapa dijual dalam bentuk kopra. - Ada 20 kepala keluarga memiliki tanaman Pala, rata-rata produksi 400 kg setahun untuk 3 kali panen. - Lahan perkebunan tersebar di 3 lindongan, terpisah dengan lahan hortikultura. - Hama Tanaman: <ul style="list-style-type: none"> o kelapa dianggap tidak terlalu Nampak. o cengkeh ulat batang, belum ada penanganan khusus, tiba-tiba kering. o pala, ulat batang, kering, gugur buah, pecah putih, belum ada perlakuan khusus seperti pemupukan dan pemberantasan hama. - Selain kelapa, pala cengkeh, tanaman lain di perkebunan sagu waru, pohon kayu: peka, gumahe, hoade, palata, nantu, malengku, kaluwatu, sengon, pilapihe, dingkaleng. Jenis Pohon buah: durian, nangka, mangga, mangga hutan, langsung, rambutan. - Musim buah sekali setahun, bergantian. - Hasil perkebunan sangat kurang, tidak bisa mendukung pertumbuhan ekonomi dan bukan sumber penghasil utama. - Luas Lahan pertanian malamenggu 400 ha. - Komoditi pertanian yang ditanam: cabe, tomat, sayuran caisin, terong, rempah-rempah, palawija (ubi jalar, ubi kayu, talas, padi ladang, jagung, kacang merah), kacang panjang, mentimun, labu, nenas, pohon melinjo. - Pengolahan tanah masih tradisional - Bertani menggunakan pupuk dan obat-obatan. - Mengolah lahan secara individu. Tanah milik dan pinjam. Petani penggarap hampir setengah. - Pemilik lahan masyarakat kampung Malamenggu dan masyarakat luar kampung. - Tanaman hortikultura sering disemprot untuk membasmi hama, sedangkan pada tanaman palawija belum dilakukan pemberantasan hama, misalnya pada padi dan jagung - Jenis hama yang sering muncul ulat, kutu. Hama-hama ini dibasmi dengan pestisida. - Ada 8 kelompok tani aktif, dengan anggota 20 orang (laki-laki dan perempuan), yaitu kelompok tani: <ul style="list-style-type: none"> o Ambang Susah di lindongan III; o Sengkanaung di lindongan II; o Tasumaro di Lindongan II; o Ora Et Labora di lindongan I; o Sengighilang di lindongan I-II; o Manasi di lindongan I-II;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> o Kahumata di lindungan I; o Batmen di lindungan I. <p>- Satwa yang sering ditemukan pada lahan pertanian: tikus, ular, sanggasi (tarsius), dan jenis-jenis burung.</p>
Pemukiman	<ul style="list-style-type: none"> - Pemukiman terbagi 3 lindungan yaitu Balau Lindungan I, Bowolaghu lindungan II, dan Belae lindungan III. - Luas pemukiman 25 ha. - Terdapat 160 rumah. - Jumlah penduduk 670 jiwa. - Menjadi Pusat pemerintahan, pendidikan, agama, kesehatan, ekonomi, seni budaya, dan sarana olahraga. - Pemukiman digunakan sebagai ruang perumahan dan dapur hidup (rempah-rempah, sayur-sayuran, toga, tanaman hias, tambak ikan nila). Ada jenis-jenis pohon buah seperti lemon (jeruk ikan), rambutan, papaya, pisang, - Ternak banyak dipelihara seperti: bebek, ayam, anjing, babi, kucing.
Sarana prasarana	<ul style="list-style-type: none"> - Jalan: <ul style="list-style-type: none"> o jalan aspal ruas jalan Manalu-Pintareng L-3,5 m, P-5200 m (jalan Kabupaten) o jalan rabat beton L-3 m, P-300 o jalan produksi L-3 m, P-600 m o jalan desa (aspal) L-3 m, P-500 m o jalan desa (belum aspal/beton) ke Birahi P-8 km o jalan kebun L-1,5 m, P-15 km tersebar di 3 lindungan: Ake u Hote 3 km, Mahalia 1 km, Tumalede 1,5 km, Pungu Lehi 1,5 km, Pungu Tabadi 1 km, Pungu Lesa 1 km, Ake Taloara 800 m, Bulude 2 km, Bentihu Pesarang 2,5 km. - Jembatan 7 buah, L 6 meter. - Sarana Air Bersih kampung: <ul style="list-style-type: none"> o SAB Bellae lindungan III melayani 45 kepala keluarga o SAB Bowolaghu lindungan II melayani 20 kepala keluarga o SAB Balau lindungan I melayani 22 kepala keluarga o SAB pusat kampung lindungan I dan II melayani 116 kepala keluarga. - PLN/PLTB, milik pemkab. - SAB kampung lain: <ul style="list-style-type: none"> o Pintareng dari mata air Balau jarak 2 km bak penampung 2x2 o Basau dari mata air Balau jarak 2 km bak penampung 2x2m o Salurang dari mata air Balau jarak 2 km bak penampung 2x2m o Lesabe dari mata air Balau jarak 1 km o Birahi dari mata air Undangeng jarak 4 km bak penampung 2x3 m o Mandoi dari mata air Balau jarak 2 km bak penampung 2x2m o Kalagheng dari mata air Kinaleheng jarak 1 km bak penampung 2x3 m.

Kawasan rawan longsor	<ul style="list-style-type: none"> - Kawasan rawan bencana longsor: Lamika, Tukade hamu, Tumalede, Bentihe Ponggo, Undangeng gantong, Lengehe, bentihu pesarang. - Kawasan rawan bencana banjir du lindongan I: Pentoe. - Kawasan rawan bencana angin: (angin Barat) lindongan I – Balau, (angin Selatan) Lindongan III – Belae, (angin Utara) Lindongan II - Bowlaghu.
-----------------------	--



Gambar 21. FGD Kampung Malamenggu

2. FGD di Kampung Bukide

FGD di kampung Bukide dilaksanakan 2 hari, tanggal 20-21 Januari 2016. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut:

a. Sejarah Kampung Bukide

Kampung Bukide berasal dari kata "BUKIT" dan "PEBAWUKIRANG". Kata Bukit menunjukkan suatu tempat yang berada di atas pegunungan, sedangkan kata Pebawukirang adalah tempat tinggal sementara.

Disebut tempat tinggal sementara karena pemukiman di dusun Bukide (waktu itu) dihuni oleh masyarakat Lesabe, Bentung, dan Simueng yang berkebudun di

sekitar dusun Bukide. Hari demi hari, masyarakat semakin bertambah, dan lama-kelamaan tempat tinggal sementara menjadi pemukiman, karena masyarakat sudah enggan turun balik ke kampungnya.

Karena sudah semakin banyak penduduk yang bermukim di dusun Bukide, dibangunlah gereja Jemaat GMIST. Pada tahun 1934 mulai diselenggarakan pendidikan, formal di sekolah.

Dirasa sudah cukup mampu untuk berdiri sendiri, pada 2 Juni 2004 Bukide, menjadi kampung persiapan. Setelah kurang lebih 2 tahun mempersiapkan dan memenuhi semua ketentuan administrasi sebagai kampung mandiri, maka pada tanggal 8 April 2006, Bukide resmi ditetapkan menjadi satu kampung definitif.



Gambar 22. FGD Kampung Bukide

b. Wilayah administrasi kampung

Kampung Bukide memiliki luas wilayah 777,42 ha. Di sebelah Utara berbatasan dengan kampung Bowongkali, Simueng, dan Bentung, di sebelah Timur

berbatasan dengan kampung Lesabe I dan Lesabe, di sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Malamenggu, dan di sebelah Barat berbatasan dengan kampung Ulung Peliang. Jumlah penduduk 301 jiwa; laki-laki 164 jiwa, perempuan 137 jiwa, dari 101 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Kampung Bukide bermata pencaharian sebagai petani yaitu sebanyak 125 orang, PNS 2 orang, Tukang 2 orang, pegawai swasta 5 orang, sopir 3 orang, pensiunan 1 orang, Ibu rumah tangga 56 orang, pelaut 3 orang, dan yang belum bekerja 104 orang.

c. Sarana prasarana

Di Kampung Bukide terdapat jalan raya sepanjang 5 km; yang sudah diaspal 4 km dan yang belum diaspal 1km. Jalan setapak 3,5 km. Jarak ke ibukota kecamatan 5 km dapat ditempuh selama 1,5 jam (jalan kaki). Jarak ke ibukota kabupaten 45 km, dapat ditempuh selama 2 jam menggunakan kendaraan.

Sarana dan prasarana umum di Kampung Bukide, antara lain: kantor kampung 1 unit, balai pertemuan umum 1 unit, gedung SD 1 unit, Puskesmas pembantu 1 unit, rumah dinas guru 1 unit, gedung ibadah (Gereja GMIST) 1 unit, MCK 3 unit, jamban keluarga 21 unit, lapangan olahraga 1 buah, rumah penduduk 87 unit.

d. Sumber daya alam

Kampung Bukide masuk dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang, terdapat 3 buah sungai yaitu sungai Ake Koaneng, sungai Batu Punareng, dan sungai Ake Simueng.

Jenis-jenis pohon yang dominan tumbuh, (dalam bahasa lokal) antara lain: Nantu, Peka, Gumahe, Pilapihe, Nangka, Hoade, Palata, Malengku, Kaluwatu, Sengon, Dingkaleng.

Pada tahu 2006 pernah dilakukan reboisasasi melalui program GERHAN pada lahan seluas 7 ha, pada tahun 2008 reboisasi melalui PNPM Lingkungan pada lahan seluas 4 ha, dan pada tahun 2011 pada lahan seluas 17 ha.

Kampung Bukide menonjol pada hasil pertanian: jenis sayur-sayuran, rempah-rempah dan umbi-umbian sangat tingkat produktifitasnya. Pertanian akan menjadi sumber penghasilan utama masyarakat Kampung Bukide dalam menunjang ekonomi keluarga.

3. FGD di Kampung Pelelangeng

FGD di Kampung Pelelangeng dilaksanakan pada tanggal 30 April 2016, bertempat di Balai Kampung dan dihadiri oleh 15 orang peserta. Hasil FGD Kampung Pelelangeng adalah sebagai berikut:

1. HUTAN

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Pohon kayu - Rotan - Bambu - Satwa (burung Niu, ular, kadal, kus-kus) 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih terjadi penebangan pohon sembarangan - Ada penembakan burung dan satwa - Belum jelas batas hutan lindung - Penggunaan senjata angin tanpa ijin - Pembukaan lahan pertanian dan perkebunan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyadaran kepada masyarakat - Penanaman kembali pohon pengganti - Pendataan kepemilikan dan penertiban penggunaan senjata angin - Perlu pemetaan kawasan hutan lindung dan memperjelas batas. - Harus ada izin penebangan pohon dan izin penjualan pohon - Perlu dikeluarkan izin pemilikan dan penggunaan mesin chain saw - Dibuat peraturan kampung

2. MATA AIR

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
Mata air: Maheng, Malahegu, Malahasa, Tedunang, Dumareduhe, Lumahedo, Linsenade, Lendu, Tampa, Dapela, Penanudang, Batung Talumengsang	<ul style="list-style-type: none"> - Sering terjadi penebangan pohon disekitar mata air. - Letak mata air berada di lahan masyarakat - Belum ada peraturan kampung yang mengatur penggunaan air - Debit air mulai berkurang - Jika kemarau panjang, mata air kering. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penanaman pohon disekitar mata air - Sosialisasi tentang pentingnya menjaga kelestarian pepohonan di sekitar mata air - Perlu dibuat perkam perlindungan mata air - Perlu aturan penggunaan air - Perlu ditetapkan radius 250 m dari mata air perlu dilindungi.

3. SUNGAI

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Sungai: Balang Seke, Pelelangeng - Satwa (udang, belut, ikan gabus, ikan lele, ikan nila - Air sungai untuk mengolah sagu 	<ul style="list-style-type: none"> - Membuang sampah - Membuang limbah pengolahan sagu - Buang hajat di sungai - Sering terjadi banjir 	<ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi - Air sungai dimanfaatkan - Dibuat peraturan kampung - Pembangunan talud pengaman di sekitar pemukiman - Penanaman pohon dipinggiran sungai

4. PERTANIAN dan PERKEBUNAN

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Pertanian hortikultura: Cabe, tomat, terong, pare, sayur-sayuran, umbi, timun, dll - Tanaman Perkebunan: kelapa, pala, cengkeh, sagu - Satwa (dalam bahasa lokal): Sanggasi, Pesi, Tumpala, Aheng, Lendu, Bakiang, Kating Tahiti, Boka-Boka, Lungsihe, Salumisi, Tanalawo, Kaliawo, Punting, Tendahe 	<ul style="list-style-type: none"> - Tanaman hortikultura sering diserang hama tikus, ulat, dll - Belum ada yang menggunakan pupuk organik - Hama kelapa - Buah kelapa kurang - Pohon pala kering karena hama pengerek batang - Buah pala pecah putih - Hama ulat cengkeh - Belum ada pembasmian hama - Binatang predator kurang - Distribusi hasil pertanian sulit - Masih terdapat lahan tidur - Sagu banyak yang tidak diolah - Produksi pertanian kurang - Kurangnya pasokan pupuk dan Obat-obatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Pelatihan dan penggunaan pembuatan pupuk organik - Penyuluhan pertanian - Penelitian hama - Pembangunan jalan produksi di lindungan I & II - Rehab jalan daerah di lindungan I & II - Memberdayakan kelompok tani - Pendampingan lebih Intensif dr BP4K - Pengolahan sagu dan hasil sagu - Perlu bantuan mesin pengolahan sagu

5. PERMUKIMAN

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> - Penduduk - Lahan pemukiman 	<ul style="list-style-type: none"> - Akses jalan sulit (Dusun I) - Belum ada jembatan - Jalan rusak - Belum ada jamban keluarga - Masih ada yang buang hajat 	<ul style="list-style-type: none"> - Pembangunan jalan - Pembangunan jembatan pelelangen (bowongbaru) - Pembangunan MCK - Jambanisasi

	disungai - Listrik belum merata - Masih ada rumah tidak layak huni - Luas kampung berbeda jauh dengan catatan dokumen yang di ajukan ke pemerintah	- Perlu bantuan rumah layak huni - Menetapkan luas kampung Pelelangeng 449 Ha sesuai hasil pemetaan. - Pemasangan patok batas kampung
--	---	---

6. TEMPAT BERSEJARAH

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
- Batu Daluagheng - Batu Balang Seke	- Belum dikenalkan - Belum ada tulisan tentang sejarah	- Terus dijaga - Penulisan sejarah batu

7. LOKASI DAERAH GALIAN C

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
Galian material di sungai Baling Seke dan sungai Pelelangeng	- Pengambilan sembarangan - Tidak melapor kepada pemerintah	- Perlu diatur dalam Peraturan kampung - Sosialisasi - Pengambilan retribusi

8. PEKUBURAN UMUM

POTENSI	MASALAH	SOLUSI
- Lahan pekuburan umum ukuran 25 m x 15 m - Lahan masyarakat	- Lahan pekuburan sudah sempit - Kuburan di pekarangan rumah mengurangi keindahan kampung - Kuburan dipekarangan rumah dapat mengurangi NJOP - Mengurangi nilai anggunan - Lahan yang ada kuburan dikeluarkan dari asset - Lahan pemukiman menjadi sempit - Pemakaman masih belum tertata	- Pengadaan lahan kuburan umum yang baru - Pengaturan lahan/penataan/pengelolaan lahan pekuburan oleh kampung.



Gambar 23. FGD Kampung Pelelangeng

2.6 Musyawarah Kampung membahas hasil FGD

Aktifitas ini tidak dilaksanakan.

Untuk mencapai keluaran 3: Pemerintah dan Masyarakat menyepakati dan melaksanakan Tata Kelola Ruang Kampung, kegiatan yang dilaksanakan adalah:

3.1 Pembahasan Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung

Merumuskan Tata Kelola Ruang Kampung adalah hal baru bagi kampung. Di daerah Kepulauan Sangihe belum ada kampung yang membuat tata ruang atau tata kelola ruang kampung.

Pada waktu berkonsultasi dengan kepala-kepala kampung, mereka sangat ingin di kampungnya ada tata ruang. Tetapi bagaimana membuatnya mereka belum tahu. Melalui program ini Sampiri pun belajar bagaimana merumuskan tata kelola ruang

kampung. Motivasi yang terkandung dalam pengusulan kegiatan pembuatan tata kelola ruang kampung dalam program adalah:

- belum ada kampung di kepulauan Sangihe yang memiliki tata kelola ruang kampung.
- supaya kampung dapat melihat bahwa dalam wilayah kampung ada ruang yang harus dilindungi dan dilestarikan. Tidak semua ruang di kampung dijadikan ruang pemanfaatan atau ruang budidaya.
- kampung memiliki referensi dalam menyusun perencanaan pembangunan kampung.
- setelah ada Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe, maka perlu ada penjabaran dan implementasi di tingkat kampung.
- adanya model pengelolaan ruang kampung, yang bisa menjadi pembelajaran.

Tahapan yang dilakukan menuju perumusan peraturan kampung adalah:

1. Menyampaikan ide bahwa melalui program ini ada hasil akhir yang bisa menjadi dokumen kampung antara lain peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung.
2. Membangun kesadaran pemerintah dan masyarakat tentang perlindungan satwa dan keragaman hayati, perlindungan hutan, mata air, sungai, daerah sempadan sungai, daerah rawan bencana, serta mengingatkan bahwa kampung yang mereka diami menjadi daerah tangkapan atau resapan air.
3. Melakukan pemetaan kampung. Dari sini terlihat visualisasi bentuk ruang kampung.
4. Melakukan diskusi kampung untuk merancang peraturan kampung.

5. Mencari dokumen yang mengatur tata ruang daerah, sehingga bisa sinergis dan sinkron antara peraturan daerah dengan peraturan kampung yang akan disusun.

Referensi yang digunakan dalam menyusun peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung adalah:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034;
2. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 7 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Sahendarumang di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
3. Hasil pemetaan kampung.
4. Hasil Focus Graoup Discussion, walaupun belum begitu sempurna.
5. Percakapan dan saran usul yang berkembang selama program dilaksanakan.

Proses pelaksanaan perumusan peraturan kampung sebagai berikut:

- Perumusan peraturan kampung di Malamenggu dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2016 bertempat di balai kampung Malamengg dan dihadiri oleh 10 orang peserta.
- Perumusan peraturan kampung di Bukide dilaksanakan pada tanggal 2 Desember 2016 bertempat di balai kampung Bukide dan dihadiri oleh 8 orang peserta.
- Perumusan peraturan kampung Pelelangeng dilaksanakan pada tanggal 6 Desember 2016 bertempat di balai kampung Pelelangeng dihadiri oleh 14 orang peserta.

Pertemuan membahas rancangan peraturan kampung dilaksanakan sehari di masing-masing kampung, selanjutnya proses pemantapan isi, dilakukan konsultasi berkali-kali dengan pemerintah kampung.

Sistematika peraturan 3 (tiga) kampung sama, sebab mengacu pada sistematika (susunan) peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Substansi (isi) peraturan kampung di 3 (tiga) kampung sama, karena secara geografis, keberadaan potensi sumber daya alam yang dimiliki, dan focus upaya pelestariannya sama, kecuali ada karakteristik khusus yang dimiliki kampung yang satu, tidak dimiliki kampung yang lain.

Hasil kegiatan perumusan peraturan kampung adalah:

1. Rancangan Peraturan Kampung Malamenggu tentang Tata Kelola Ruang Kampung.
2. Rancangan Peraturan Kampung Bukide tentang Tata Kelola Ruang Kampung.
3. Rancangan Peraturan Kampung Pelelangeng tentang Tata Kelola Ruang Kampung.



Gambar 24. Rancangan Peraturan Kampung

3.2 Konsultasi Peraturan Kampung ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten

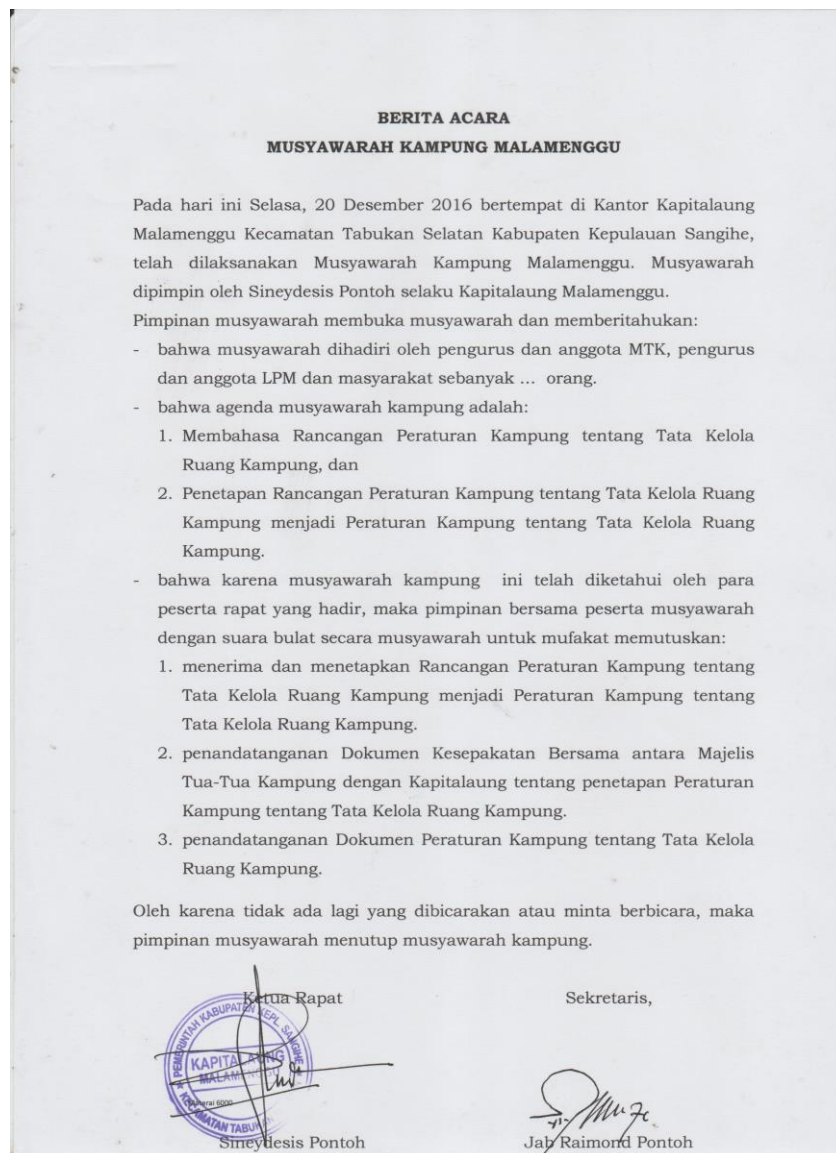


Gambar 25. Konsultasi Peraturan Kampung dengan Bagian Hukum

Setelah dihasilkan rancangan peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng, selanjutnya diajukan kepada bagian hukum sekretariat daerah kabupaten kepulauan Sangihe untuk diperiksa. Peraturan kampung yang diserahkan kepada bagian hukum, mendapat catatan-catatan perbaikan, khususnya pada bagian konsideran mengingat, banyak peraturan yang berubah, jadi harus disesuaikan. Sedangkan isi peraturan kampung disarankan berkonsultasi dengan BAPPEDA dalam penerapannya. Bagian hukum juga menyarankan agar peraturan kampung ini harus dilengkapi dengan berita acara musyawarah kampung dan kesepakatan bersama Majelis Tua-Tua Kampung dengan Pemerintah kampung tentang penetapan peraturan kampung.

3.3 Penetapan Peraturan Kampung oleh pemerintah Kampung bersama Majelis Tua-Tua Kampung

Saran dari bagian hukum diikuti, saat penetapan peraturan kampung, disertai juga dengan penandatanganan berita acara musyawarah kampung, penandatanganan kesepakatan bersama Majelis Tua-Tua Kampung dengan pemerintah kampung, dan penandatanganan peraturan kampung oleh kepala kampung dan sekretaris kampung.



Gambar 26. Berita Acara Musyawarah Kampung

Dokumen peraturan kampung yang ditandatangani adalah:

1. Peraturan Kampung Malamenggu Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Ruang Kampung.
2. Peraturan Kampung Bukide Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Ruang Kampung.
3. Peraturan Kampung Pelelangeng Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Tata Kelola Ruang Kampung.

1.2 Pelembagaan inisiatif Pengelolaan Alam Kampung yang berkelanjutan

Salah satu target program adalah adanya kelompok atau lembaga di kampung yang akan mendampingi dan mengawal pelaksanaan peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung. Lembaga ini terinspirasi dari kelompok Elung Banua di Kampung Ulung Peliang, Lelipang dan Binala yang ada di Kecamatan Tamako. Kelompok Elung Banua mendampingi pelaksanaan peraturan kampung tentang pelestarian alam kampung.

Kondisi yang sama dengan Elung Banua diharapkan akan terjadi di kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng.

Dari proses konsultasi dan pendekatan dengan kampung, dari 3 kampung yang difasilitasi, hanya Kampung Bukide yang pemerintah dan masyarakat kampung sepakat membentuk kelompok khusus. Kelompok ini akan bertugas mengawal pelaksanaan peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung. Proses pembentukan kelompok dilakukan oleh kampung, pada tanggal 23 Desember 2016.

A. Hasil

DESKRIPSI	INDIKATOR	HASIL
<p>Goal: Mewujudkan kawasan Hutan Lindung Sahendarumang lestari, yang mendukung pelestarian karagaman hayati dan keberlanjutan jasa lingkungan.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laju kerusakan habitat di KBA berkurang 50 % dibanding base-line. 2. KBA di luar kawasan konservasi berhasil di konservasi. 3. Ancaman terhadap jenis-jenis prioritas berkurang hingga pada tingkat yang tidak membahayakan pelestarian jenis-jenis tersebut. 4. Masyarakat adat dan atau lokal mendokumentasikan dan memetakan hak kelola mereka di sekitar KBA. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum bisa diukur 2. Mata air, sempadan sungai dan kawasan rawan lonsor masuk dalam kawasan yang dilindungi. 3. Belum dapat diukur. 4. Pemetaan dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah kampung masih sebatas batas wilayah administratif kampung, kawasan hutan, mata air, sungai dan sempadan sungai serta daerah rawan longsor.
<p>Tujuan: Menciptakan pengelolaan kampung yang mendukung pelestarian kawasan hutan lindung Sahendarumang dan keragaman hayati didalamnya.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Stakeholder dan masyarakat di 3 kampung melakukan aksi pelestarian kawasan hutan lindung. 2. Masyarakat di 3 kampung Mengelola karagaman hayati dalam kawasan Sahendarumang secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta tidak lagi membuka lahan pertanian baru didalam kawasan hutan lindung Sahendarumang. 3. Masyarakat di 3 kampung menyepakati dan melaksanakan Tata Kelola Ruang Kampung. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aksi stakeholder dan masyarakat kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng pertama-tama menyiapkan aturan dalam bentuk peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung. 2.
<p>Keluaran 1: Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memahami pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung dan merubah perilaku yang merusak sumber daya hayati</p>	<p>Pemerintah kabupaten memberikan dukungan program pada lokasi proyek pada tahun anggaran 2015 atau 2016 dan membantu memverifikasi PERKAM 3 kampung di tahun 2016; Pemerintah kecamatan menghadiri beberapa pertemuan yang dilaksanakan proyek di tahun 2015 dan 2016; Tokoh agama memasukan kegiatan konservasi ditahun pelayanan 2016; masyarakat mendukung dan melaksanakan aksi pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang pada saat proyek dilaksanakan dan setelah proyek selesai.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah kabupaten mengalokasikan dana sebesar Rp 30.000.000,- untuk kegiatan survey dan investigasi eksistensi hutan lindung Sahendarumang di Kampung Lelipang. 2. Bagian Hukum Sekretariat Daerah, membantu memeriksa konsideran peraturan kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng, memberikan catatan perbaikan dan rekomendasi koordinasi dengan SKPD teknis untuk pelaksanaan perkam.

		<p>3. Pemerintah kecamatan menghadiri kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sosialisasi program di kampung Bukide; - Menjadi pemateri dalam kegiatan lokalatih tokoh agama di kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng. <p>4. Beberapa Jemaat memasukan program penghijauan, kebersihan lingkungan, penanaman pohon waktu peristiwa kelahiran bayi.</p> <p>5. Pemerintah dan masyarakat terlibat dalam proses pelaksanaan proyek, dan memasukan ide-ide program lanjutan dalam RPJM Kampung dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.</p>
Aktivitas:		
1.1 Sosialisasi awal proyek di pemerintah kabupaten dan kecamatan	Pada bulan pertama Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe, pemerintah kecamatan Tabukan Selatan dan Tabukan Tengah mengetahui dan memahami program yang akan dilaksanakan.	Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Bupati Kepulauan Sangihe, BAPPEDA, BLH, Dinas Pertanian Peternakan Perkebunan dan Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Tabukan Selatan dan Tabukan Tengah, sudah mengetahui dan memahami program karena mereka menghadiri kegiatan sosialisasi dan juga ikut terlibat dalam beberapa kegiatan.
1.2 Sosialisasi awal proyek di kampung	Pada bulan pertama Pemerintah Kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangen serta masyarakat sebanyak 90 orang telah mengetahui, memahami dan mendukung program yang akan dilaksanakan.	Sebanyak 71 orang warga masyarakat kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng telah mengetahui, memahami dan mendukung program yang akan dilaksanakan.
1.3 Lokalatih pendalaman konservasi kepada Tokoh Agama	Lokalatih pada bulan kedua dilaksanakan 3 kali diikuti oleh 60 orang Tokoh Agama	Lokalatih dilaksanakan di 3 Kampung: Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng dan dihadiri 157 orang.
1.4 Pembuatan dan distribusi material kampanye penyadartahuan	Pada bulan ke 1, 6-8, Baliho 50 Imbr dan Pembatas buku 1.500 Imbar terdistribusi kepada stakeholder dan masyarakat Sangihe	<ul style="list-style-type: none"> - Baliho dibuat 6 versi, tiap kampung 2 versi. 1 versi dicetak 9 lembar. Total baliho yang dicetak 54 lembar. - Pembatas buku dibuat 1.000 lembar.

		<ul style="list-style-type: none"> - Poster dan pembatas buku didistribusikan di kampung dan gereja-gereja, di 3 kampung target.
Keluaran 2: Adanya Tata Kelola Ruang Kampung dan rencana implementasi yang mendukung pelestarian Hutan Lindung Sahendrumang dan Keanekaragaman Hayati lokal.	Adanya Dokumen Kesepakatan Tata Kelola Ruang Kampung.	Dokumen yang dihasilkan adalah Peraturan Kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung.
Aktivitas:		
2.1 Pertemuan kampung membahas tentang pelaksanaan pemetaan partisipatif kampung	Pertemuan kampung pada bulan ke 2-4 di 3 kampung dihadiri oleh pemerintah kampung, pemerintah kampung berbatasan dan tim pemetaan	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan dilaksanakan di 3 kampung dihadiri oleh pemerintah kampung dan tim pemetaan, sedangkan pemerintah kampung berbatasan diinformasikan setelah pertemuan dan diajak bersama-sama menelusuri batas kampung. - Hasil pertemuan adalah jadwal kegiatan penelusuran batas kampung.
2.2 Pemetaan Partisipatif	Terlaksananya pemetaan partisipatif di 3 kampung pada bulan 2-4	<ul style="list-style-type: none"> - Pemetaan kampung secara partisipatif sudah dilaksanakan di kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng. - Hasil dari pemetaan ini, adalah data mentah berupa titik-titik koordinat yang diambil menggunakan alat GPS dan harus diolah lagi, untuk mendapat gambar 2 dimensi diatas kertas. - Pemetaan melibatkan aparat kampung tetangga yang berbatasan. - Tidak ditemui adanya konflik tata batas diantara kampung-kampung yang berbatasan.
2.3 Pengolahan data	Adanya Peta Ruang Kampung di 3 Kampung pada bulan ke 3-5	<ul style="list-style-type: none"> - Data di GPS disalin dan diolah menggunakan program ArtGIS 10, memperoleh data point table. - Point table diolah lagi dengan system digitasi sehingga diperoleh draft peta 3 kampung. - Draft peta 3 kampung

2.4 Pembahasan hasil pemetaan bersama Tim Pemetaan	Terlaksananya pertemuan pembahasan hasil pemetaan di 3 kampung dihadiri oleh Tim Pemetaan dan Pemerintah kampung, Hasil Pembahasan diserahkan kepada Pemerintah Kampung	<ul style="list-style-type: none"> - Pertemuan membahas hasil pemetaan dan pengolahan data dilaksanakan di 3 kampung. - Perubahan pada draft peta, diperbaiki, dan diolah kembali dan menghasilkan peta final.
2.5 FGD Perumusan Tata Kelola Ruang Kampung	FGD perumusan Tata Kelola Ruang Kampung dilaksanakan di 3 kampung dihadiri oleh lembaga-lembaga kampung dan pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Berdasarkan hasil pemetaan, teridentifikasi potensi, masalah, solusi dan tindak lanjut.
2.6 Musyawarah Kampung membahas hasil FGD	Draft Final Tata Kelola Ruang Kampung tersusun dan diserahkan kepada Pemerintah Kampung	<ul style="list-style-type: none"> - Kesepakatan-kesepakatan pengelolaan ruang.
Keluaran 3: Pemerintah dan Masyarakat menyepakati dan melaksanakan Tata Kelola Ruang Kampung.	Pemerintah dan masyarakat di 3 kampung membentuk peraturan kampung yang disepakati bersama dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab	<p>Telah dibentuk dan disepakati peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung di kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Kampung Malamenggu Nomor 4 Tahun 2016; 2. Peraturan Kampung Bukide Nomor 8 Tahun 2016; 3. Peraturan Kampung Pelelangeng Nomor 4 Tahun 2016.
Aktivitas:		
3.1 Pembahasan Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung	Draft Peraturan Kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung pada 3 kampung	<ul style="list-style-type: none"> - 3 dokumen draft peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung
3.2 Konsultasi Peraturan Kampung ke Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten	Adanya memo/masukan/revisi dari Bagian Hukum Pemerintah kabupaten Sangihe terhadap 3 draft Peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung	<ul style="list-style-type: none"> - 3 dokumen draft peraturan kampung diserahkan ke bagian hukum sekretariat daerah untuk diperiksa. - Bagian hukum memeriksa konsideran dan memberi catatan penyempurnaan. - Bagian hukum merekomendasikan untuk berkonsultasi dengan pemerintah khususnya badan dan dinas teknis.
3.3 Penetapan Peraturan Kampung oleh pemerintah Kampung bersama Majelis Tua-Tua Kampung	Peraturan Kampung Tentang Tata Kelola Ruang Kampung disepakati dan disahkan oleh pemerintah 3 kampung.	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara hasil musyawarah menyepakati peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung, dari 3 kampung. - Kesepakatan bersama pemerintah kampung dengan Majelis Tua Kampung (MTK = BPD) - Perkam 3 kampung yang

		sudah ditandatangani kepala kampung dan diundangkan oleh Sekretaris kampung
3.4 Pelembagaan inisiatif Pengelolaan Alam Kampung yang berkelanjutan	Adanya 3 kelompok swadaya yang dibentuk secara partisipatif yang mendampingi kesepakatan dan peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung.	<ul style="list-style-type: none"> - Berita Acara Pembentukan kelompok di kampung Bukide. - SK Pembentukan Kelompok Tasumaro yang berfungsi mengelola Tata Ruang Kampung.

II. PROGRAM DAN KEGIATAN LAIN

Dalam mendukung program pelestarian hutan lindung Sahendarumang untuk konservasi jenis terancam punah dan jasa-jasa lingkungan yang vital, ada beberapa kegiatan yang tidak termasuk dalam aktifitas, namun dilaksanakan. Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka persiapan pelaksanaan program dan karena dampak dari pelaksanaan program.

❖ Program dan kegiatan yang dilaksanakan rangka persiapan program antara lain:

1. Kunjungan tim CEPF dan Burung Indonesia ke kelompok Elung Banua.

Diskusi dengan Elung banua dilaksanakan di rumah kepala Kampung Binala pada tanggal 20 September 2015. Kepala kampung adalah penasihat dalam struktur organisasi Elung Banua. Sebelum diskusi dilaksanakan Burung Indonesia dan CEPF terlebih dulu berkunjung ke PLTM Ulung peliang untuk melihat pemanfaatan sumber air di PLTM yang menjadi indikator terjaganya sumber air di kawasan sahendarumang. Dalam diskusi dengan kepala kampung Binala, ternyata intensitas masyarakat untuk menebang kayu dan membuka lahan sudah sangat berkurang, terlihat dari mulai utuhnya areal hutan yang dulunya terlihat bekas pembukaan lahan. Hal ini juga diperkuat dengan masih ditaatinya peraturan desa yang telah disusun bersama beberapa tahun sebelumnya.

Dalam pertemuan tersebut sangat diharapkan kehadiran kepala kampung Ulung Peliang dan Lelipang serta pengurus Elung Banua hadir, namun sampai dengan tim kembali ke Tahuna, pengurus belum juga datang. Informasi yang

diterima dari Kepala kampung bahwa Ketua Elung Banua sudah meninggal dunia, dan perlu dilakukan pergantian kepengurusan.

2. Sosialisasi tentang program dan konservasi kepada KPA di Kecamatan Manganitu.

Pada tanggal 20 September 2015 (pagi) tim Burung Indonesia dan CEPF menyempatkan diri mampir bertemu dengan kelompok pencinta alam yang sedang melaksanakan Perkemahan/Pelatihan KPA di Pantai Barangkalang Kecamatan Manganitu. Pada pertemuan tersebut tim diberi kesempatan menyampaikan motivasi dan pemahaman kepada kelompok pecinta alam tentang pentingnya pelestarian alam, dan pentingnya melakukan aksi nyata pelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Tim juga menjelaskan keterkaitan dan hubungan kerja antara lembaga lokal, nasional dan internasional dalam semangat bersama menjaga dan melestarikan alam secara bersama-sama dalam kacamata global. Sebab dampak kerusakan suatu ekosistem yang ada disuatu tempat akan memberikan dampak pada kerusakan lingkungan secara global. Demikian pula pelestarian alam yang dilakukan di tingkat lokal akan memberikan dampak pada kondisi lingkungan secara global.

Pelaksana pelatihan menjelaskan bahwa kegiatan bersama dilaksanakan secara rutin setiap tiga bulan sekali. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa kelompok pecinta alam di wilayah kecamatan Manganitu, antara lain Gempala Manganitu, KPA Mentahi, KPA Tumpara, KPA Barangkalang, dan KPA FAR Belengan. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan adalah perkemahan

selama 2 hari yang agenda kegiatannya adalah pemberian materi dari berbagai narasumber serta aksi bersih pantai.

Perkumpulan Sampiri mengingatkan undangan kepada pengurus kelompok pencinta alam untuk berdiskusi dengan burung Indonesia dan CEPF di Megaria café pada malam harinya.

3. Pertemuan tim CEPF dan Burung Indonesia dengan KPA/CSO lokal di Sangihe. Sebelumnya tanggal 19 September 2015, Sampiri melakukan koordinasi dengan beberapa Kelompok Pencinta Alam (KPA) dan CSO , dengan maksud mengundang pengurus KPA dan CSO dalam pertemuan dengan Burung Indonesia dan tim CEPF, yang akan dilaksanakan tanggal 20 September 2015 di Megaria Café. Kelompok Pencinta Alam yang dihubungi dan terundang adalah: Gempala Manganitu, KPA Mentahi, KPA Tumpara, KPA Barangkalang, dan KPA FAR Belengan, Anemon, Yayasan Sampiri dan Yapeka. Hasil koordinasi tersebut, semua KPA dan CSO yang dihubungi siap hadir dalam pertemuan.

Pertemuan dengan KPA/CSO dilaksanakan pada tanggal 20 September 2015 bertempat di Megaria Café. Pertemuan dihadiri oleh kurang lebih 20 orang dari beberapa KPA/CSO yang terundang.

Setelah saling berkenalan, TIM RIT menyampaikan maksud kunjungan ke Sangihe sekaligus menjelaskan program yang akan dilaksanakan di Sangihe melalui dukungan CI-CEPF.

Penjelasan TIM RIT selanjutnya ditanggapi dan direspon peserta yaitu antara lain:

- Informasi tentang program CEPF belum banyak diketahui oleh KPA/ CSO yang ada di Sangihe.
- KPA/CSO belum memiliki Akta Notaris sebagai prasyarat bagi pelaksana program.
- Adanya keterbatasan KPA/CSO dalam menyiapkan proposal kegiatan.
- KPA/CSO tertarik dengan program tersebut dan mau mengirimkan aplikasi ke CEPF.
- YAPEKA mempertanyakan dan meminta masukan terkait proposal mereka yang belum terjawab.

Dari tanggapan KPA/CSO, TIM RIT memberikan beberapa solusi yaitu:

- Pertemuan ini merupakan kesempatan sosialisasi program, dan membuka peluang bagi semua KPA/CSO mengajukan aplikasi.
- RIT akan memikirkan bagaimana cara mengakomodir keinginan KPA yang belum memiliki badan hukum agar dapat berpartisipasi sebagai pelaksana program.
- Bagi KPA/CSO yang mampu membuat badan hukum, sebaiknya dapat segera membentuk badan hukum.
- RIT juga memberikan penegasan bahwa secara badan hukum Perkumpulan Sampiri berbeda dengan Yayasan Sampiri.

❖ Program dan kegiatan yang dilaksanakan karena dampak dari pelaksanaan program antara lain:

1. Penyuluhan di SMP Negeri 1 Tabukan Selatan

Penyuluhan di SMP Negeri 1 Tabukan Selatan, dilaksanakan atas inisiatif pengurus OSIS. Melalui guru Pembina OSIS, sekolah mengundang Perkumpulan Sampiri untuk melakukan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan. Kegiatan ini sekaligus memberikan motivasi bagi siswa SMP Negeri 1 Tabukan Selatan, untuk membentuk kelompok pencinta alam di sekolah. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 24 Oktober 2015 bertempat di SMP Negeri 1 Tabukan Selatan. Hadir dalam kegiatan sosialisasi sebanyak 50 orang terdiri dari 20 siswa laki-laki dan 30 siswa perempuan.

Kegiatan pelestarian alam perlu ditanamkan bagi masyarakat di sekitar kawasan Hutan Lindung Sahendarumang. SMP Negeri 1 Tabukan Selatan merupakan salah satu sekolah yang terletak di sekitar kawasan Sahendrumang.

Dalam kesempatan itu Perkumpulan Sampiri menyampaikan materi tentang:

- a. Sejarah pencinta alam
- b. Pentingnya Pelestarian Alam
- c. Keragaman hayati Sangihe
- d. Manajemen organisasi

2. Penguatan KSPA Linnaeus SMA Negeri 1 Manganitu

21 September 2015 Siswa SMA N 1 MANGANITU mengetahui, memahami dan mendukung program yang akan dilaksanakan oleh PerkumpulanSampiri. KSPA SMA N IMANGANITU5 Orang 82 Orang Siswa(42 Laki-Laki- 40 Perempuan)

Kegiatan ini merupakan bagian dari program perkumpulan sampiri yaitu pendidikan lingkungan. Kegiatan sosialisasi bertepatan dengan pelantikan anggota baru Kelompok Siswa Pecinta Alam (KSPA) Linnaeus di SMA N 1 Manganitu. Dalam sambutannya wakil kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam kontribusi pendidikan di lembaga SMA N 1 Manganitu khususnya pendidikan lingkungan. Dalam kegiatan ini, Tim sampiri memberikan beberapa materi yaitu:

1. Sejarah pecinta alam Indonesia dan wawasan pecinta alam oleh Juandi Arendege
2. Sejarah KSPA Linnaeus SMA N 1 Manganitu oleh Yan Lumasuge
3. Manajemen perjalanan dan Global Warming oleh Deni Piara
4. Ekosistem Sangihe oleh Samsared Barahama

Antusias peserta dalam hal ini calon anggota KSPA Linnaeus sangat terasa dengan adanya perhatian dan pertanyaan yang diajukan oleh beberapa calon anggota kepada pemateri. Di akhir kegiatan, Pembina KSPA, Drs. A. Dalensang mengharapkan adanya kerjasama dengan Perkumpulan Sampiri dalam memfasilitasi kegiatan pendidikan lingkungan dan pelestarian alam di SMA N 1 Manganitu khususnya untuk KSPA Linnaeus.

3. Inisiatif memasukan program lingkungan ke dalam RPJM Kampung

Perkumpulan Sampiri dilibatkan dalam penyusunan RPJM Kampung. Dalam konteks ini, Perkumpulan Sampiri menyampaikan ide-ide kegiatan yang dimungkinkan untuk dimasukan dalam struktur program jangka menengah kampung sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun

2014 tentang Desa serta peraturan pelaksanaannya. Kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng, mengakomodir usulan-usulan kegiatan dari program yang mendukung pelestarian hutan lindung Sahendarumang, menjadi program dan kegiatan dalam RPJM Kampung tahun 2016-2021.

4. Survey dan investigasi eksistensi kawasan lindung Sahendarumang

Salah satu indikator keberhasilan keluaran 1: Pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat memahami pentingnya pelestarian kawasan hutan lindung dan merubah perilaku yang merusak sumber daya hayati adalah pemerintah kabupaten memberikan dukungan program pada lokasi proyek pada tahun anggaran 2015 atau 2016.

Untuk mencapai indikator ini, dilakukan komunikasi intensif dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kepulauan Sangihe, sejak bulan September-November 2015 dan bulan April-Juli 2016. Dari komunikasi ini, diperoleh dukungan pembiayaan pelaksanaan program dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten kepulauan Sangihe tahun anggaran 2016 sebesar Rp 30.000.000,-. Oleh BAPPEDA program tersebut dikemas dengan judul kegiatan survey dan investigasi eksistensi kawasan lindung Sahendarumang.

Sebagai realisasi program tersebut, BAPPEDA Kabupaten Kepulauan Sangihe membangun kerjasama kemitraan dengan Perkumpulan Sampiri.

Program dilaksanakan bulan Juli-Desember 2016 dengan memilih lokasi di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako.

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

1. Pembuatan sketsa kampung Lelipang
2. Pengamatan tutupan hutan
3. Pengamatan mata air
4. Diskusi terfokus dengan pemerintah, lembaga dan tokoh masyarakat
5. Lokakarya kelompok Elung Banua

Hasil kegiatan antara lain:

1. Penyuluhan/sosialisasi tentang pelestarian lingkungan di SMP Negeri 1 Tabukan Selatan dan SMA Negeri 1 Manganitu dengan jumlah peserta 140 siswa.
2. KPA dan CSO di Sangihe diberikan peluang yang sama untuk mengirim aplikasi proposal ke CEPF.
3. Ide-ide program diadopsi oleh kampung dan masuk menjadi bagian dalam perencanaan kampung (RPJM) dan dibiayai melalui APBK.
4. Pemerintah kampung Lelipang akan melanjutkan kegiatan pembuatan sketsa kampung menjadi pemetaan wilayah administratif kampung. Lanjutan kegiatan ini penting bagi kampung untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
5. Pemerintah kampung Lelipang mengalokasikan dana pemetaan wilayah administratif kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) tahun anggaran 2017.
6. Kelompok Elung Banua Kampung Lelipang diaktifkan kembali, dan pemerintah kampung memfasilitasi pembentukan kepengurusan yang baru

dan mengalokasikan dana pengembangan kelompok Elung Banua dalam APBK tahun anggaran 2017.

7. Pemerintah dan masyarakat kampung Lelipang berkomitmen mempertahankan eksistensi fungsi kawasan hutan lindung Sahendaruang sebagai habitat satwa dan daerah tangkapan air, yaitu antara lain dengan tidak membuka lahan pertanian di kawasan lindung hutan Sahendarumang.
8. Kelompok Elung Banua ingin melaksanakan program kampung wisata.
9. Kelompok Elung Banua, mengajukan rancangan peraturan kampung tentang Pelestarian Kawasan Lindung.

I. DAMPAK DAN PEMBELAJARAN

A. Dampak

Dampak pelaksanaan program dilihat dari 4 sudut pandang:

a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA

Dalam KBA Sahendarumang terdapat jenis-jenis burung khas. Dari pelaksanaan kegiatan ini ancaman terhadap jenis-jenis satwa khas, dan jenis satwa lainnya teridentifikasi, yaitu adanya perburuan satwa walaupun dalam skala kecil, menggunakan senapan angin dan jerat. Pemerintah dan masyarakat menyadari adanya kegiatan perburuan satwa. Kalau sebelum program pemerintah dan masyarakat masih menganggap kegiatan perburuan satwa merupakan hal yang biasa, namun setelah dilaksanakannya program ini, pemerintah dan masyarakat sudah memahami manfaat dari keragaman dan kekayaan alam, maka pemerintah dan masyarakat termotivasi untuk melindunginya. Yaitu dengan cara memberikan pengertian kepada semua masyarakat, apakah lewat khotbah digereja, himbauan pemerintah kampung maupun melalui kegiatan-kegiatan konservasi. Pendataan dan pelarangan penggunaan senapan angin sudah diatur dalam tata kelola ruang kampung. Dengan adanya pemahaman bersama seperti ini maka ancaman terhadap jenis-jenis prioritas di dalam hutan lindung maupun diluar kawasan lindung berkurang.

b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

Sebelum adanya program ini, kampung belum memiliki model atau potret ruang kampung. Setelah program dilaksanakan pemerintah dan masyarakat

dapat melihat ruang kampung yang saat ini mereka tempati. Dimana wilayah kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangeng masuk dalam kawasan hutan lindung Sahendarumang. Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 452/Kpts-II/1999, luas kawasan hutan lindung Sahendarumang 3.549 hektar. Dari proyeksi luasan ini dapat di lihat bahwa sebagian besar wilayah kampung masuk dalam kawasan lindung. Oleh karena sejak awal penetapan kawasan hutan lindung ini telah mendapat penolakan masyarakat, maka dengan tidak mengabaikan keputusan Menteri tersebut diatas, disepakati bahwa kawasan hutan adalah wilayah yang sudah terpetakan menurut kondisi yang ada sekarang ini. Kecuali di Kampung Malamenggu, pemerintah dan masyarakat sepakat, dari batas wilayah kampung ditarik 1,1 km kearah kampung, dijadikan suatu wilayah yang tidak dapat dikelola untuk lahan pertanian.

Peraturan Kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung, mengakomodir kepentingan masyarakat dengan tidak mengesampingkan fungsi lindung dari kawasan lindung yang ada di kampung Malamenggu, Bukide dan Pelelangan.

Penataan ruang kampung yang ditegaskan menjadi peraturan kampung, merupakan awal atau fundasi dari sebuah harapan pengelolaan Sahendarumang yang lebih baik.

c. Masyarakat di sekitar KBA dan stakeholder terkait lainnya

Program ini sedikit banyak telah memberikan manfaat kepada masyarakat, pemerintah daerah, pemerintah kampung, lembaga kampung, tokoh agama, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari sisi ekonomi, belum terlihat kontribusi program terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Akan tetapi dalam waktu panjang, secara langsung maupun tidak langsung, dampak ekonomi dari pelaksanaan program ini akan dirasakan. Misalnya adanya ketersediaan air di kampung apabila daerah tangkapan air tetap terjaga.

Dari sisi peningkatan pengetahuan, dengan adanya program ini masyarakat dan pemerintah kampung semakin memahami tentang pentingnya pelestarian lingkungan dan bagaimana peran masyarakat, pemerintah, tokoh agama, lembaga kampung dalam menjaga dan melestarikan alam kampung.

Dari sisi penyelenggaraan pemerintahan, program ini memberikan kontribusi besar bagi terbentuknya peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung. Sebab selama ini belum ada kampung di kabupaten kepulauan Sangihe yang membuat peraturan kampung seperti ini. Peraturan Kampung ini selanjutnya menjadi referensi kampung dalam menata program pembangunan kampung.

Dari sisi kelembagaan masyarakat, melalui program ini telah terbentuk satu kelompok swadaya masyarakat yang diberi nama TASUMARO. Kelompok ini berperan sebagai pengelola ruang kampung di Kampung Bukide Kecamatan Tabukan Selatan yang akan mendampingi pelaksanaan peraturan kampung tentang tata kelola ruang kampung.

d. Dukungan pemerintah daerah dan pemerintah desa

Selama pelaksanaan program, pemerintah daerah maupun pemerintah kampung sangat membantu.

Bentuk dukungan pemerintah kabupaten antara lain:

- Memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi awal program bagi satuan kerja perangkat daerah;
- Mengalokasi dana bagi program pendukung pelestarian hutan lindung Sahendarumang, yang dilaksanakan di Kampung Lelipang Kecamatan Tamako yang berbatasan dengan kampung Malamenggu dan Bukide.
- Membantu memverifikasi dan memeriksa Rancangan Peraturan Kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung.
- Membuka diri dalam hal berkomunikasi terkait pelaksanaan kegiatan.
- Bupati memberikan rekomendasi untuk pelaksanaan pemetaan wilayah administratif kampung, walaupun secara teknis dokumentasi terjadi miskomunikasi.

Bentuk dukungan pemerintah kampung antara lain:

- Memberi izin melaksanakan program di kampung.
- Memobilisasi masyarakat, lembaga kampung dan tokoh agama agar terlibat aktif dalam pelaksanaan program.
- Memberikan motivasi kepada perangkat kampung tentang pentingnya program ini bagi penyelenggaraan pemerintah kampung.
- Memfasilitasi komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dari berbagai denominasi yang ada di kampung dalam pelaksanaan lokakarya pendalam konservasi bagi tokoh agama.
- Membantu menyiapkan tempat akomodasi dan konsumsi bagi pelaksanaan program.

- Memberikan kesempatan kepada program untuk memasukan ide-ide kegiatan lingkungan dalam RPJM Kampung.
- Memfasilitasi dan bersama-sama membentuk peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung.

Kabupaten Kepulauan Sangihe memiliki Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2014-2034. Sampai program ini dilaksanakan belum ada regulasi di kampung yang menjabarkannya secara operasional lokal. Selama ini peraturan daerah hanya mengatur sampai kepada kepentingan dan kebijakan di tingkat kabupaten, tidak sampai kepada penataan di tingkat kampung. Harapannya Peraturan Kampung yang terbentuk melalui program ini menjadi model bagi kampung lain dalam menjabarkan Peraturan Daerah tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Oleh karena Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe berlaku sampai dengan tahun 2034, maka usia berlakunya produk hukum kampung hasil program yaitu Peraturan Kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung akan dan masih relevan belaku selama 18 tahun kedepan sampai dengan tahun 2034.

Pengelolaan ruang kampung yang diatur dalam peraturan kampung tidak membatasi masyarakat kampung maupun masyarakat luar kampung untuk mengakses jasa-jasa lingkungan seperti air. Semua sudah diatur secara demokrasi sehingga hak-hak dasar dari masyarakat tetap terlayani.

A. Pembelajaran

Setelah program dilaksanakan, ada evaluasi yang dilakukan untuk melihat pembelajaran-pembelajaran apa saja yang diperoleh selama melaksanakan program. Secara garis besar pembelajaran dikelompokkan sebagai berikut:

a. Faktor penghambat :

- *Otorisasi pemerintah kampung yang tidak dapat dilewati.* Misalnya dalam hal pengaturan jadwal kegiatan harus disepakati dengan pemerintah kampung (apabila kegiatan melibatkan pemerintah kampung), jadwal yang disepakati bisa berubah apabila pemerintah kampung memiliki agenda kegiatan lain, atau kepala kampungnya tidak berada ditempat.
- *Pekerjaan pembangunan di kampung.* Kegiatan yang melibatkan masyarakat sering terhambat akibat masyarakat sibuk mengerjakan pekerjaan pembangunan kampung. Apalagi dengan alokasi dana kampung yang sangat besar.
- *Birokrasi pemerintah daerah yang panjang dan berbelit-belit.* Untuk pengurusan surat menyurat terkadang terhambat dengan birokrasi pemerintahan yang panjang. Contoh nyata adalah disposisi surat permohonan rekomendasi kegiatan pemetaan dari Bupati yang tidak pernah sampai ke kantor BLH, padahal pencatatan administrasi surat masuk dan keluar jelas.
- *Cuaca ekstrim yang sering terjadi di kepulauan Sangihe.* Untuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan dilapangan, misalnya pemetaan wilayah kampung, sering terhambat karena cuaca hujan atau berkabut.

- *Faktor keamanan.* Pada saat program dilaksanakan, terjadi kasus pembunuhan di satu kampung. Selama beberapa bulan masyarakat dihimbau untuk tidak melakukan aktifitas di sekitar hutan karena disinyalir si pembunuh berkeliaran di kebun dan hutan dan selalu berpindah-pindah menghindari kejaran polisi. Akibatnya masyarakat kampung enggan melakukan kegiatan pemetaan kampung karena merasa tidak aman. Hampir 2 bulan tidak ada kegiatan lapangan. Masyarakat mulai lega dan mau melanjutkan kegiatan setelah mendapat informasi bahwa si pembunuh sudah ditangkap polisi.
- *Kapasitas personil dan lembaga yang masih terbatas.* Program ini merupakan program pertama yang dikerjakan oleh Perkumpulan Sampiri secara institusi, dan merekrut tenaga baru sebagai upaya regenerasi pelaku konservasi. Keterbatasan personil dan manajemen pengelolaan program yang belum tertata, menjadi salah satu penghambat pelaksanaan program.
- *Isu tata batas hutan lindung.* Program sangat berhati-hati menggunakan istilah batas hutan lindung, mengingat 2 kampung target yaitu Malamenggu dan Bukide adalah kampung yang menolak sangat keras pemasangan patok batas hutan lindung Sahendarumang.

b. Faktor pendukung :

- Pemerintah kabupaten, pemerintah kampung, dan masyarakat lokasi kegiatan menerima program dengan baik dan memberikan dukungan yang luar biasa.

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan pelaksanaannya, memberikan peluang dan ruang yang sangat besar bagi program untuk datang dan hadir di kampung.
 - Keterbatasan pemerintah dan masyarakat kampung dalam menjabarkan dan menerapkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaannya, menyebabkan tingginya ketergantungan pada kegiatan pendampingan.
 - Isu lingkungan yang dibawa sangat dekat dengan kehidupan masyarakat, yaitu isu air dan kawasan lindung. Sedangkan isu burung khas menurut masyarakat penting tetapi tidak secara langsung menyentuh kehidupan masyarakat.
 - Akses menuju kampung lokasi kegiatan sangat mudah.
- c. Metode dan pendekatan program yang berhasil

Dalam melaksanakan program ini, Perkumpulan Sampiri menggunakan metode dan pendekatan sebagai berikut:

❖ Metode

Metode yang digunakan adalah:

1) Metode pengkajian kampung secara partisipatif.

Dalam melaksanakan kegiatan yang sifatnya mengkaji keadaan dan kondisi kampung, metode yang digunakan adalah metode pengkajian kampung secara partisipatif. Metode ini dipilih karena dapat dikerjakan dan dilakukan oleh masyarakat berdasarkan kemampuan alami yang dimiliki. Masyarakat sendiri yang mengambil keputusan atas apa yang diperoleh dari pengkajian. Suatu keuntungan dari metode pengkajian

kampung secara partisipatif adalah bahwa masyarakat dihargai kemampuan dan pengetahuannya, masyarakat merasa memiliki hasil pekerjaannya, dan masyarakat mau bekerja menindaklanjuti hasil pekerjaannya. Masyarakat sangat senang dilibatkan dalam proses pengkajian kampung.

2) Metode musyawarah untuk mufakat.

Untuk suatu kegiatan yang bersifat pengambilan keputusan, metode yang dipilih adalah musyawarah untuk mufakat. Metode ini sangat efektif dan luar biasa dalam menyatukan keragaman bahasa, ide, perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan.

❖ Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah:

1) Pendekatan kekeluargaan

Pendekatan kekeluargaan digunakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat petani yang memiliki dan menggarap lahan pertanian yang ada disekitar hutan, mata air atau yang memiliki lahan di sempadan sungai, tentang pentingnya memanfaatkan sumber daya alam secara lestari dan berkesinambungan. Kita hadir, menemui, dan bercakap dengan mereka layaknya keluarga, menjadikan kita dekat dan diterima masyarakat.

2) Pendekatan pemerintahan

Dalam hal memasukan ide-ide kegiatan pelestarian lingkungan dalam rencana pembangunan kampung, penataan ruang kampung dan pembentukan peraturan kampung, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sistem pemerintahan dengan membawa Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Mengapa Undang-undang dan peraturan tersebut yang digunakan sebagai pintu masuk? Karena Undang-Undang dan peraturan tersebut wajib dilakukan oleh semua kampung, sebab berhubungan dengan penetapan anggaran kampung.

3) Pendekatan keagamaan

Masyarakat kepulauan Sangihe masih dikenal dengan masyarakat religius. Pendekatan keagamaan sangat penting di tempuh untuk mendaratkan pesan-pesan pelestarian yang sesuai dengan ajaran agamanya. Penyampaian pesan pelestarian melalui organisasi keagamaan menyadarkan umat tentang peran dan tanggung jawabnya sebagai ciptaan yang mulai. Melalui lembaga keagamaan, pesan-pesan pelestarian dapat terus disampaikan kepada umat.

4) Pendekatan pendidikan

Untuk kegiatan di sekolah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pendidikan. Dimana pesan pelestarian yang disampaikan bersifat mendidik dan materi yang disampaikan bersesuaian dengan

mata pelajaran dan materi yang diajarkan di sekolah, sehingga dapat memberikan pengetahuan dan pengkayaan bagi siswa yang menerima materi. Dengan pendekatan pendidikan, maka program dapat diterima oleh pihak sekolah.

- d. Rekomendasi strategi, metode, atau pendekatan yang sesuai bagi pelaksanaan program serupa ke depan.

Dari pengalaman melaksanakan program ini, dapat direkomendasikan untuk menerapkan strategi, metode dan pendekatan yang diuraikan diatas, karena sangat relevan dilaksanakan untuk kegiatan serupa yang dapat direplikasi di kampung lain atau di daerah lain, dengan menyesuaikan isu dan kondisi masyarakat setempat.

- e. Peningkatan kapasitas organisasi yang diperoleh

Program pelestarian hutan lindung Sahendarumang untuk konservasi jenis terancam punah dan jasa-jasa lingkungan yang vital, merupakan program pertama yang dikelola Sampiri sejak didirikan. Melalui program ini, Perkumpulan Sampiri banyak belajar dalam mengelola program dan mengelola lembaga. Banyak hal strategis dan teknis yang dapat dipelajari dalam mengembangkan program kedepan dan dalam menyelenggarakan kegiatan lembaga.

II. PENUTUP

Kegiatan-kegiatan dalam program ini dilaksanakan bukan semata-mata hanya untuk pemenuhan kebutuhan laporan proyek, namun lebih kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat yang membutuhkan pendampingan dalam melahirkan ide-ide kegiatan yang mendukung pelestarian lingkungan dan pembangunan kesejahteraan masyarakat di kampung. Karena itu dari pendekatan proyek yang pelaksanaannya dibatasi oleh waktu, perkumpulan sampiri mengembangkannya menjadi pendekatan program. Artinya ketika kegiatan selesai menurut hitungan waktu proyek, tidak berarti kegiatan ini berakhir, akan tetapi Perkumpulan Sampiri akan terus mengawal apa yang sudah terbangun sekarang, agar ke depan menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat dan bagi pemerintah dalam menata perencanaan pembangunan kampung. Kegiatan ini adalah sebuah awal, fundasi untuk kegiatan lanjutan. Pemerintah kampung didorong untuk melaksanakan peraturan kampung tentang Tata Kelola Ruang Kampung, sehingga menjadi referensi yang terus-menerus dipakai dalam perencanaan pembangunan kampung.

Demikian penyajian laporan pelaksanaan program Pelestarian Hutan Lindung Sahendarumang untuk Konservasi Jenis Terancam Punah dan Jasa-jasa Lingkungan yang Vital. Semogra bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dengan upaya pelestarian hutan lindung Sahendarumang dan satwa khas yang hidup di dalamnya.
